



# Cerita-Cerita Setelah Damai

Laporan LBH Banda Aceh  
dan [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co)

# Cerita-Cerita Setelah Damai

Laporan LBH Banda Aceh  
dan sinarpidie.co



## **Cerita-Cerita Setelah Damai**

Laporan LBH Banda Aceh & sinarpidie.co

Cetakan I, Mei 2024

### **Tim Investigasi:**

LBH Banda Aceh & sinarpidie.co

### **Penulis:**

Firdaus – sinarpidie.co

Diky Zulkarnen – sinarpidie.co

### **Penyunting:**

Azhari Aiyub

### **Cover & Artwork:**

Idrus bin Harun & Iswadi Basri

### **Tata Letak:**

Zulham Jusuf

### **Penerbit:**

LBH Banda Aceh

Jl. Sakti, Lr. Tgk. Hamzah No. 1 Desa Pango Raya

Kec. Ulee Kareng – Banda Aceh 23116

Telp. (0651) 8057952

Email: lbh\_aceh1995@yahoo.com

<http://lbhbandaaceh.org>

# Daftar Isi

Pengantar	<b>Warisan Kekerasan Konflik Senjata</b>
Hal. 6 _____	
Tajuk Rencana	<b>Informasi &amp; Rantai Kontrol</b>
Hal. 16 _____	
	<b>Cara Kotor Kopassus Memburu Pawang Rasyid</b>
Hal. 29 _____	
	<b>Penyiksaan David Yuliansyah di BNNP Aceh dan Muslihat Mengaburkan Fakta Kematiananya</b>
Hal. 83 _____	
	<b>Bagaimana Aktivitas Penambangan Minyak Ilegal di Ranto Peureulak Berjalan?</b>
Hal. 141 _____	

# Warisan Kekerasan Konflik Senjata

Pada tahun 2016 Komnas HAM RI merilis Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Simpang KKA Aceh. Dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM dengan terang mengatakan bahwa terdapat perilaku kejahatan kemanusiaan di Aceh. Komnas HAM menyebutkan bahwa terdapat dua puluh tiga orang terbunuh dan tiga puluh orang lainnya menjadi korban persekusi.

Akhir tahun 2018, Komnas HAM RI kembali merilis temuan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Rumoh Geudong, Pidie. Lokasi ini merupakan salah satu Pos Satuan Taktis dan Strategis (Sattis) militer ketika konflik senjata berlangsung di Aceh. Komnas HAM menyebutkan terdapat lima jenis aksi kejahatan negara terhadap korban di pos sattis Rumoh Geudong, yaitu perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan,

pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional dan penghilangan orang secara paksa.

Wilayah-wilayah lain yang belum diselidiki oleh Komnas HAM, hanya bisa menunggu waktu, itu pun kalau diagendakan masuk dalam perencanaan. Selebihnya masyarakat memang tidak pernah bisa jauh berharap.

Selain itu, pada akhir tahun 2021 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh juga telah mempublikasikan laporan akhir untuk masa kerja periode 2016-2021. Laporan tersebut disusun berdasarkan hasil pengambilan pernyataan sebanyak 5.264 korban. Dari hasil pengambilan pernyataan tersebut KKR Aceh telah merekomendasikan kepada pemerintah Aceh 245 korban sebagai penerima reparasi mendesak, dan 5.178 korban sebagai penerima reparasi komprehensif. Ini menunjukkan bahwa benar adanya tindakan kekerasan oleh negara di Aceh pernah terjadi dengan jumlah korban yang tidak sedikit.

Dalam laporan akhir masa kerja Komisioner KKR Aceh periode pertama itu juga disebutkan bahwa dalam kurun waktu 1976-2005 terdapat beragam peristiwa pelanggaran HAM, yakni: peristiwa penyiksaan, peristiwa penghilangan orang secara paksa, peristiwa pembunuhan di luar proses

hukum, dan peristiwa kekerasan seksual. Peristiwa-peristiwa ini, sebagaimana umum diketahui, telah berdampak serius pada korban dan/atau keluarganya yang telah diambil pernyataannya.

Karenanya rekomendasi yang disusun dalam laporan akhir KKR Aceh periode 2016-2021 itu tidak hanya berkenaan dengan pemenuhan hak korban oleh negara secepatnya. Tapi dalam rangka menghormati pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan untuk pemajuan serta penghormatan HAM di masa depan, KKR Aceh juga merekomendasikan kepada negara untuk melakukan: perubahan hukum, politik dan administrasi; pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi; reparasi pada korban, dan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM dan tindakan lainnya.

Sisi lain yang tidak terpisahkan dari konflik senjata adalah kaitannya dengan kepentingan eksploitasi sektor sumber daya alam yang merampas ruang sebagai hajat hidup orang banyak. Tindakan kekerasan dalam bentuk perampasan lahan juga kerap dialami masyarakat sepanjang berlangsungnya konflik senjata di Aceh. Eksploitasi kekayaan alam dengan dalih agenda investasi hingga memungkinkan terjadinya perampasan hak masyarakat haruslah juga dianggap sebagai kekerasan. Semisal, eksploitasi tambang minyak dan gas alam PT. Arun sejak tahun 1974 di Aceh Utara-Lhokseumawe, mengakibatkan empat ratusan kepala keluarga bersama anak istri harus

kehilangan tempat tinggal mereka.

Hal itu kemudian dilanjutkan lagi dengan bagaimana ExxonMobil—perusahaan pemilik 30% saham PT. Arun, memfasilitasi alat negara dalam melakukan pelanggaran HAM yang berlangsung di sepanjang area eksploitasi perusahaan. Pengadilan District of Columbia di Washington, D.C., Amerika Serikat, menjelaskan bahwa ExxonMobil membayar \$500.000 per bulan kepada alat negara untuk biaya pengamanan, yang dalam pelaksanaannya, atas nama pengamanan, alat negara tersebut telah secara brutal melakukan tindakan-tindakan pelanggaran HAM seperti penyiksaan, pembunuhan pemerkosaan, dan lain sebagainya terhadap masyarakat sipil. Tindakan kekerasan ini, menjadi terang benderang setelah pengadilan District of Columbia di Washington, D.C., Amerika Serikat, menghukum perusahaan ExxonMobil untuk membayar \$288.900,78 atau Rp4 miliar, mengganti biaya hukum kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Aceh Utara, tepatnya di lokasi perusahaan beroperasi.

Agenda penyiksaan manusia pada sektor sumber daya alam jenis lain, juga berlangsung di Aceh. Walau dengan mesin pengisap bumi yang berbeda. Di Aceh Timur, semasa konflik, alat negara melangsungkan pembantaian di lahan perkebunan kelapa sawit. Demikian juga di Aceh Tamiang. Alat negara menjadi kuasa dari pemodal, melangsungkan kekerasan, penghilangan paksa, masyarakat diculik karena melawan untuk mempertahankan tanahnya yang dirampas untuk perizinan perkebunan kelapa sawit.

Agustus tahun ini, perjalanan kesepakatan damai Aceh akan memasuki umur 19 tahun. Perdamaian ini, menjadi penanda waktu penting dalam agenda pembangunan masa depan Aceh lebih baik, kekepannya. Bagi masyarakat Aceh, suasana hari-hari paska damai tentu berbeda dengan hari-hari sepanjang hampir tiga dekade dalam kondisi konflik senjata. Meskipun hanya elite yang tahu agenda negara selanjutnya, masyarakat sama sekali tidak dapat memprediksi, kecuali sekadar membayangkan harapan-harapan. Namun setidaknya kesepakatan damai menjadi titik temu sekiranya dapat dijadikan oleh masyarakat Aceh untuk bisa menikmati kemanusiaannya di hari-hari mendatang, yang hampir setiap hari, sepanjang konflik senjata Aceh, hilang direnggut secara kasar.

Daerah bekas konflik senjata memang selalu mengisahkan luka mendalam akibat praktik kekerasan yang terjadi selama konflik berlangsung. Begitu juga dengan riwayat panjang konflik senjata Aceh, tidak ada yang mampu menapiskan bahwa ragam kekerasan terjadi. Kekerasan terhadap tubuh seperti pemerkosaan, *extra juducial killing*, penangkapan sewenang-wenang, pembantaian, penculikan, penembakan massal dan atau penyiksaan dalam bentuk lainnya adalah benar adanya di Aceh. Sikap atas perilaku kekerasan yang demikian, kemudian berdampak pada kehidupan sosial masyarakat pasca konflik berlangsung. Perilaku kekerasan yang saban hari menjadi tontonan, atau bahkan dipertontonkan semasa konflik, kerap menjadi warisan yang kemudian menjadi *legacy*, contoh buruk yang

dipraktikkan di era damai, oleh siapa pun.

Kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang, dengan tersendirinya terlembagakan dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik oleh masyarakat itu sendiri, negara, dan atau bahkan alat negara. Konsekuensinya jika agenda perdamaian tidak mengarah pada pemulihan perilaku kekerasan, maka kekerasan itu sendiri akan menjadi pembenaran dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan ketika saat konflik senjata telah berakhir kemanusiaan bagi masyarakat Aceh hanya sebatas ilusi.

Sejatinya, perdamaian bukan hanya tentang bagaimana masyarakat sebatas merasakan bangun pagi dan meregangkan otot-ototnya sambil mengucek kedua belah matanya tanpa rasa waswas. Tapi esensi penting dari agenda perdamaian adalah jembatan pembangunan yang berkeadilan. Sebagai daerah transisi konflik senjata, pekerjaan utama yang mesti dikerjakan adalah membangun dan menyusun agenda penyelesaian masalah *structural violence* (kekerasan struktural) agar mimpi penyelesaian kekerasan *structural justice* (keadilan struktural) di Aceh dapat terwujud.

Untuk itu, perlu diulang-ulang Pertanyaan mendasar tentang perjalanan perdamaian Aceh adalah, sudah sejauh mana kemanusiaan bagi masyarakat Aceh mencapai puncaknya dalam kurun waktu satu tahun kurang menuju tiga dekade nantinya tepat pada 15 Agustus tahun 2025?

Buku laporan ini adalah salah satu cara mengulang pertanyaan mendasar di atas. Melalui publikasi hasil

investigasi mendalam ini, akan membantu mengilustrasikan gambaran terhadap bagaimana pertunjukkan kekerasan di Aceh dimasa lalu, dan juga tentang keberlanjutan kekerasan di masa setelah damai yang terus melanggeng. Atas keterbatasan baik sumber daya manusia, waktu dan sumber daya keuangan investigasi ini hanya dapat dilakukan untuk tiga peristiwa saja.

LBH Banda Aceh bersama dengan Sinar Pidie mencoba memberi jawaban terhadap keterbatasan tersebut melalui pemilihan isu dan peristiwa untuk dilakukan investigasi. Terdapat tiga peristiwa yang disepakati oleh tim untuk dilakukan investigasi jurnalistik. Pertama untuk kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu, dilakukan investigasi terhadap peristiwa penyiksaan, pembantaian dan extra judicial killing di Geumpang, Kabupaten Pidie. Kedua untuk peristiwa praktik *extra judicial killing* yang terjadi paska damai, investigasi dilakukan terhadap kasus kekerasan yang menyebabkan kematian dalam penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Dan yang ketiga terkait dengan keterlibatan alat negara pada sektor tata kelola sumber daya alam, Investigasi dilakukan terhadap pengeboran minyak ilegal di Aceh Timur.

Investigasi yang bersifat produk jurnalistik mendalam terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang berlangsung di Aceh ini dilakukan oleh LBH Banda Aceh dengan media online Sinar Pidie (sinarpidie.co) dan didukung oleh Kurawal Foundation. Dalam pengumpulan informasi tentunya terdapat banyak kendala dan hambatan. Baik dalam

pengumpulan data maupun pasca publikasi.

Dalam pelaksanaan investigasi terhadap pengeboran minyak ilegal di Aceh Timur misalkan, beberapa narasumber kunci yang sudah diidentifikasi sejak awal menolak bertemu dan diwawancarai. Bahkan beberapa yang telah mengonfirmasi pertemuan secara tiba-tiba membatalkannya dengan alasan keamanan diri. Hal ini cukup dipahami mengingat bisnis illegal ini masih berlangsung hingga saat ini dengan melibatkan cukup banyak pihak. Beberapa titik pengeboran bahkan hanya selemparan batu dari kantor aparat penegak hukum. Mustahil penegak hukum tidak mengetahui praktik ini. Mendalami rantai bisnis dan pelaku di sektor tersebut menjadi tantangan besar dengan waktu yang terbatas dan validasi yang rumit.

Begitu pula pascapublikasi. Kantor sinarpidie.co pernah didatangi anggota TNI yang meminta sinarpidie.co mengubah judul artikel berita *Cara Kotor Kopassus Memburu Pawang Rasyid*. Personel TNI ini juga meminta sinarpidie.co membuat video permintaan maaf pada Kopassus. Selain itu, setelah artikel berita *Penyiksaan David Yuliansyah di BNNP Aceh dan Muslihat Mengaburkan Fakta Kematian*nya terbit, anggota BNN berkali-kali mengutarakan niat mereka untuk berkunjung ke kantor sinarpidie.co meski mereka kelak mengurungkan niat mereka itu.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu kelancaran penyusunan

buku laporan ini. Inilah cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjadi pengingat kepada semuanya, terutama kepada pemangku kebijakan tentang betapa banyaknya pekerjaan rumah di Aceh yang harus di selesaikan sebagai agenda perdamaian, demi masa depan Aceh yang lebih baik.

Banda Aceh, 30 Maret 2024

Syahrul, S.H., M.H.  
Direktur LBH Banda Aceh Periode 2019 - 2023

# Informasi & Rantai Kontrol

Azhari Aiyub

**B**UKU tipis ini merupakan hasil kolaborasi LBH Banda Aceh dan [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) (selanjutnya disingkat SP). LBH Banda Aceh memberikan dukungan kepada SP untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa tertentu yang dianggap memiliki pengaruh dalam kehidupan publik tetapi karena satu dan lain hal peristiwa tersebut tidak dapat dipahami. Hasil investigasi ini kemudian diumumkan di SP antara Agustus 2023-Februari 2024 dengan tiga peristiwa utama, yakni pembunuhan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Kopassus terhadap anggota dan simpatisan Aceh Merdeka pada 1995 di Geumpang selama pemberlakuan DOM di Aceh; kematian tidak wajar David Yuliansyah setelah ditahan secara

sewenang-wenang oleh Badan Narkotika Aceh; dan kegiatan penambangan minyak rakyat di Peureulak, Aceh Timur.

Kerjasama seperti ini dapat dilihat bagaimana publik, dalam hal ini diwakili oleh LBH Banda Aceh, bertemu dengan jurnalisme demi mendapatkan kejelasan terhadap suatu informasi. Ini adalah contoh bagus bagaimana redaksi mempertimbangkan pendapat publik dalam menavigasi arah editorial mereka. Semakin gigih jurnalisme menerapkan disiplin dan profesionalismenya, tentu saja dapat diuji berdasarkan mutu pemberitaan yang dihasilkan, makin jelas informasi yang sampai kepada publik. Skema ini bertolak-belakang dengan pariwisata, informasi jenis lain yang menyusup sebagai berita serta bertujuan membentuk persepsi tertentu kepada khalayak.

Kegigihan untuk mendapatkan informasi yang tersembunyi dan bagaimana menggunakannya dengan cermat serta memeriksa ulang fakta berkali-kali telah membentuk tradisi panjang dalam jurnalisme investigatif, yang semua upaya ini bertujuan memberikan dampak kepada publik terutama dalam cara mereka menilai sebuah kenyataan. Dengan demikian kenyataan tidak bisa lagi dimanipulasi atau dikendalikan oleh negara dan kaum bisnis, dua entitas yang selalu membayang-bayangi kehidupan publik dan lazim melakukan hubungan terlarang. Selamat dan beruntunglah masyarakat yang memiliki pers yang menaruh rasa hormat kepada publik untuk mengawasi bagaimana para birokrat menjalankan negara atau kelompok bisnis menumpuk kekayaan mereka.

Akhir-akhir ini, setidaknya di Aceh, kejelasan terhadap informasi adalah barang langka. Setiap hari kita memang membaca berita dan laporan, yang sering kali sumber utamanya dapat diprediksi, yakni humas institusi resmi, tapi hanya berupa penjelasan sepihak. Jarang ada upaya untuk meragukan pernyataan institusi resmi, seolah-olah apa yang diberitakan memang sudah seharusnya seperti itu. Apabila berita-berita tersebut kita susun secara ensiklopedik dan kronologis, setidaknya dalam jangka waktu sepuluh tahun ke belakang, untuk membantu kita mendapatkan gambaran tertentu tentang Aceh, kenyataan kita, maka kenyataan itu disusun berdasarkan sudut pandang birokrat, anggota dewan, polisi, tentara, agamawan, dan asosiasi kontraktor. Kenyataan itu tampak datar, stabil, harmonis, dan terkendali. Tidak ada keresahan, kekacauan, keputusasaan, penyakit, penderitaan, dan bunyi perut orang miskin yang keroncongan. Kalaupun ada masalah yang diberitakan, seperti korupsi, maka masalah tersebut tiba-tiba kehilangan pelaku. Pers tidak pernah bergerak melampaui siaran dan konferensi pers sumber-sumber resmi yang memiliki reputasi sangat rendah dalam hal keterbukaan informasi dan dikutip secara verbatim pula, apalagi memaksa aparat penegak hukum mencari dan menemukan pelaku. Tidak pernah ada investigasi lebih lanjut, tidak pernah ada kebocoran data yang akan memberikan kejutan kepada khalayak. Akan tetapi mustahil tidak ada pelaku sama sekali, karena pers sangat senang dengan para pelaku. Peran pelaku inilah kemudian diberikan kepada para kriminal kecil yang

sial, miskin, dan tidak memiliki pengaruh, yang biasanya ditampilkan dalam sesi foto oleh humas polisi atau kejaksaan, misalnya dalam kasus-kasus kejahatan narkoba. Para pelaku jenis ini tidak pernah dianggap layak sebagai narasumber, dari mana seharusnya kejahatan dapat dipahami dengan lebih baik.

Pada titik ini kita sebenarnya telah kehilangan kesempatan untuk menerapkan pers bebas yang telah kita nikmati sejak Reformasi 1998.

Rezim pers bebas memungkinkan publik untuk dapat mengakses informasi secara terbuka sekaligus menjadikannya sebagai hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Akan tetapi, yang jarang disadari adalah bahwa informasi merupakan semacam rantai pasokan panjang dan rumit, di mana pada simpul-simpul tertentu, sebelum diterima oleh pembaca, selalu ada seleksi, kontrol, dan pembatasan.

Berbeda dengan jurnalisme yang bertekad agar arus informasi mengalir deras tanpa hambatan (setidaknya begitulah yang sering kita dengar dalam doktrin kelas jurnalistik dasar), kantor humas yang dikelola baik oleh negara maupun entitas bisnis, simpul lain dalam rantai pasokan ini, akan selalu membatasi informasi tentang apa yang sedang mereka kerjakan kecuali informasi tersebut relevan dan bernilai strategis, dengan kata lain menyediakan informasi sejauh itu menguntungkan reputasi organisasi. Walaupun kedua praktik ini saling tergantung, memberikan porsi yang dominan kepada humas dalam setiap pemberitaan

bukan hanya tidak akan menghasilkan produk jurnalistik yang memadai tapi dapat membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap nilai berita. Dalam kasus yang lebih ekstrem, keintiman antara biro humas dan redaksi, akan menggiring publik pada informasi menyesatkan. Pemberitaan tentang acara-acara seremonial, seperti peresmian dan pemotongan pita oleh kantor pemerintah, yang sebenarnya tidak ada nilai berita sama sekali, jika diberitakan secara konsisten, akan mengaburkan kasus-kasus mismanajemen atau bahkan korupsi sistemik yang dilakukan oleh organisasi yang sama. Media yang menerapkan standar tinggi secara tradisional dilindungi oleh dinding api, batas suci antara iklan dan berita, tapi bahwa batas tersebut dewasa ini telah meleleh berbanding lurus dengan merosotnya mutu produk jurnalistik yang dihasilkan.

Pada simpul yang paling menentukan, informasi yang harusnya sampai kepada publik dapat dicegah begitu saja di ruang kontrol redaksi. Ada banyak motif untuk melakukan pengekangan ini. Alasan yang paling sering kita dengar dan tentu saja tidak masuk akal, redaksi punya semacam tanggung jawab moral untuk tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat (bahasa yang diwariskan oleh Pers Orba) ataupun untuk tidak membuka kembali luka lama—jargon yang dipinjam dari humas atau intel tentara menyangkut informasi tentang kejahatan HAM masa lalu). Tanggung jawab moral ini tentu saja tidak lahir dari perdebatan panjang tentang etika dalam disiplin jurnalistik, namun semata-mata pada ketidakmampuan dalam menerapkan

standar minimum yang dituntut terhadap sebuah produk jurnalistik. Lebih daripada yang mau diakui, alasan yang paling bisa diterima sebenarnya adalah latar belakang hubungan yang hangat antara redaksi dengan klien.

Menempatkan tanggung jawab moral di atas standar minimum, berarti jurnalisme tidak lagi memandang pembaca sebagai publik yang punya wawasan dan nalar, sebaliknya sebatas sebagai konsumen. Pengekangan diri yang berlebihan cenderung bersifat patologis, yang akarnya mungkin dapat kita lacak akibat pukulan bertubi-tubi yang diterima oleh pers pada masa kediktatoran, yang membentuk watak tidak percaya diri bahwa jurnalisme dapat melakukan tugasnya dengan benar. Dewasa ini, pengekangan diri menemukan bahasa barunya, yakni netralitas atau tidak berpihak. Upaya mencapai standar minimum dalam menjalankan prosedur jurnalistik bisa dituduh sebagai tidak netral. Laporan-laporan yang diturunkan SP dalam tiga tahun terakhir berkali-kali disalahpahami sebagai tidak netral, bukan karena situs berita ini tidak menjalankan prosedur *cover both side*, melainkan karena mereka memberikan konteks pada setiap laporan mereka. Secara sinis kita mungkin bisa mengatakan bahwa jurnalisme adalah bisnis *cover both side*, di mana upaya mencapai obyektifitas terhadap fakta kadangkala berakhir pada keseimbangan semu jika relasi kuasa antara masing-masing pihak yang diberitakan cenderung timpang. Tidak ada netralitas dalam konteks, semuanya sangat tergantung pada bias individu, pada ideologi, dari mana para editor sejak satu

abad terakhir menulis tajuk rencana dan secara terbuka menunjukkan keberpihakan mereka pada publik yang diwakilinya.

**TIGA** berita dalam investigasi SP yang dirangkum dalam buku ini, menurut hemat saya, adalah bagaimana SP berupaya menguji – sekali lagi – apa yang mungkin dapat dilakukan oleh jurnalisme untuk mencapai kejelasan. Berita pertama, *Cara Kotor Kopassus Memburu Pawang Rasyid (CKKMPR)*, sesungguhnya adalah sebuah kisah dari 30 tahun silam ketika Rezim Orba melancarkan Operasi Jaring Merah di Aceh untuk menumpas kelompok separatis Aceh Merdeka. Seperti di Timor Leste, perang kontra gerilya yang dipimpin oleh Kopassus di Aceh adalah salah satu operasi militer paling brutal dalam sejarah kediktatoran Orba, merenggut 5.000 nyawa penduduk sipil dengan kerusakan jangka panjang yang sulit dipulihkan selama setidaknya dua generasi.

Generasi yang lahir di bawah era 90-an mungkin cukup mengerti tentang DOM, tetapi ada satu aspek yang paling tidak jelas tentang subyek ini, yakni akuntabilitas negara terhadap bagaimana operasi ini dijalankan, antara lain mencakup tanggung jawab dan rantai komando, serta status penduduk sipil yang menjadi korban. Untuk mencapai akuntabilitas yang dimaksud tidak selalu harus menunggu niat baik negara, misalnya melalui kerja komisi kebenaran, publik dan media dapat melakukannya secara *de facto*.

Berita-berita mengerikan dan pilu tentang periode DOM tentu saja sudah banyak dilaporkan, yang kadang disalin ulang untuk momen peringatan tertentu, tetapi apa yang membedakannya dengan CKKMPR adalah pada bagaimana fakta yang sebelumnya samar dan tidak pernah jelas diperiksa ulang dengan mengandalkan puluhan narasumber dan bocoran arsip rahasia. Laporan arsip rahasia militer yang menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan operasi perburuan Pawang Rasyid, salah seorang pentolan Aceh Merdeka di Geumpang, diverifikasi dengan ketelitian yang mengesankan kepada belasan saksi mata yang berdasarkan kronologi berada pada waktu dan lokasi yang sangat dekat dengan kejadian. Kesempatan untuk menerapkan disiplin seperti ini hampir tidak pernah ada selama masa kediktatoran, ketika pers dikontrol dengan ketat bahkan diperalat untuk membela kepentingan nasional. Di sisi lain, waktu berpengaruh pada fakta, yang jika lama tidak disentuh akan mengubahnya menjadi tambah buram. Melalui laporan ini apa yang publik dapatkan? Pertama adalah akurasi dan kecocokan yang nyaris tanpa cela antara arsip rahasia dan pengakuan saksi mata, yang mungkin dapat digunakan untuk mendukung bukti tentang kejahatan berat HAM selama DOM. Kedua, fakta bahwa para narasumber adalah mereka yang selama tiga puluh tahun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Geumpang, latar di mana sejumlah pembunuhan tanpa pengadilan terhadap penduduk sipil terjadi, adalah sebuah kecamatan yang relatif jauh dari pusat bisnis dan pemerintahan. Dekat

atau jauhnya sebuah lokasi akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana fakta dapat diungkap dan inilah yang menyebabkan perlu tiga puluh tahun bagi para penyintas untuk memberikan kesaksiannya. Terakhir, membuktikan betapa luasnya jangkauan operasi militer pada masa DOM, yang di beberapa kecamatan bahkan mungkin tidak pernah dan tidak akan pernah diketahui.

Apakah negara yang pernah punya pengalaman panjang dalam menggunakan kekerasan untuk menyerang dan melumpuhkan target-target sipil akan berhenti melakukan kekerasan walaupun negara telah menyerap nilai-nilai demokrasi yang mereformasi tatanan hukum dan perilaku beringas hamba hukumnya? Jawabannya adalah tidak. Seperti pengaruh buruk narkoba, kekerasan yang dilakukan penyelenggara negara juga bersifat adiktif dan sulit dinetralisir. Ketika negara menyerang David, sebagaimana dilaporkan oleh SP dalam *Penyiksaan David Yuliansyah di BNNP Aceh dan Muslihat Mengaburkan Fakta Kematianannya*, fungsi kekerasan bukan hanya sebatas untuk mengukur dan menjamin ketertiban publik, tapi juga sebagai bentuk kebutuhan, yakni kecanduan akan perasaan memegang kendali. Naluri ini tumbuh seiring dengan menguatnya kultur impunitas di lingkungan para penyelenggara negara. Pengalaman telah mengajarkan mereka bahwa ada gunanya menjadi kejam, lagi pula tidak ada yang peduli.

Dalam kasus pemberantasan narkoba di Aceh yang setidaknya telah berlangsung dalam dua dekade terakhir,

media pada dasarnya peduli dan khawatir dengan tingginya angka peredaran narkoba di mana porsi pemberitaan tentang masalah ini relatif dominan. Aparat penegak hukum yang mengesankan dirinya sebagai protagonis jujur dan bersih dengan lihai mengeksploitasi media yang polos serta tidak keberatan menyediakan ruangnya bagi publik untuk menonton pemberantasan narkotika, akan tetapi media lengah tentang sisi gelapnya, yakni tempat di mana para bandit telah dibunuh tanpa perlawanan atau diberi kesempatan membela diri. Dengan demikian elemen kekerasan negara dalam perang ini teralihkan. Grafik pemberitaan yang tidak seimbang antara keberhasilan operasi dan kerusakan yang ditimbulkannya hanya akan membentuk perasaan nyaman publik yang semu.

Tidak selamanya investigasi berjalan mulus. Laporan terakhir SP, *Bagaimana Aktivitas Penambangan Minyak Ilegal di Ranto Peureulak Berjalan?*, adalah contoh bagaimana investigasi yang menemui jalan buntu. SP sepertinya sedang mencoba mengikuti rute distribusi minyak ilegal, yang diduga dimanfaatkan oleh industri skala menengah untuk mendapatkan bahan bakar murah yang berada di luar distribusi resmi yang dikontrol Pertamina, termasuk dugaan keterlibatan para aparat penegak hukum dalam melancarkan rantai pasokan. Bisnis ilegal seperti pertambangan rakyat telah lama menjadi tempat berkumpul bagi para pemodal yang asal-usul uangnya tidak ingin terlacak yang didapat dari sumber ilegal dan lazim dimanfaatkan untuk pembiayaan politik.

Namun SP tidak mempunyai narasumber yang dapat diandalkan untuk meretas informasi yang mungkin berhubungan dengan klaim di atas lebih jauh. Para narasumber, umumnya penambang, terlatih untuk tidak banyak berbicara, karena sifat ilegal dari pekerjaan mereka. Jika fakta kita bayangkan sebagai bangkai, maka selalu ada batas dalam disiplin jurnalistik untuk mengurai bangkai tersebut. Batas ini tidak ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya – seperti ancaman ataupun suap – melainkan pada prosedur yang telah dikembangkan sendiri oleh profesi ini selama satu abad terakhir. Pendek kata SP menghadapi masalah yang paling mendasar yakni verifikasi.

Walaupun demikian, SP mencoba memberi kita petunjuk tentang fakta tersebut bahwa pelaku ilegal dari bisnis ini bukan hanya rakyat, melainkan kegagalan tata kelola pemerintahan di sektor pertambangan. Lokasi ekstraksi minyak di Ranto Peureulak sebenarnya bukanlah area tertutup, sebaliknya milik Pertamina dan perusahaan daerah Aceh Timur serta berada dalam jangkauan aparat penegak hukum. Ketika kedua perusahaan negara menelantarkan sumur-sumur minyaknya yang dari skala industri mungkin sudah tidak lagi menguntungkan, para donatur mengambil alih dan mengelolanya dengan teknologi yang murah dan sederhana. Dengan dalih bahwa kawasan bekas tambang itu sekarang dikelola oleh rakyat, Pertamina dan BUMD Aceh Timur mungkin selamat dari tanggungjawab memulihkan kawasan bekas tambang dari pencemaran yang tentu saja berbiaya tinggi. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh

rakyat dengan teknologi yang sederhana adalah menetralkan limbah ekstraksi yang telah mencemari air, udara, dan tanah. Di samping itu, pemerintah Aceh Timur seperti tidak berdaya mengatur bisnis ini, setidaknya untuk mengurangi potensi risiko kecelakaan kerja yang sehari-hari dihadapi oleh para penambang. Sejak ledakan sumur minyak pada 2018 yang memakan korban hampir 50 jiwa kondisinya tidak banyak berubah.



Pawang Rasyid

## Cara Kotor Kopassus Memburu Pawang Rasyid

Perburuan Panglima GAM Wilayah Pidie, Pawang Rasyid, yang dimulai sejak Juli 1990 dan berakhir pada 20 Juni 1995, berlangsung brutal dan kotor. Kopassus membumihanguskan rumah-rumah warga, melakukan sejumlah pembunuhan kilat terhadap penduduk sipil, termasuk memenggal dan mamerkan dua kepala pendulang emas; menyeret warga di jalan dengan mobil hidup-hidup, dan meneror warga dengan meninggalkan mayat-mayat korban yang dituduh terlibat dalam Aceh Merdeka di sepanjang jalan Tangse-Geumpang.

**D**I TENGAH kemarau panjang yang mengancam Geumpang, siang itu, 18 Juli 1990, delapan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merayapi lereng bukit di belakang jembatan Cot Kuala di Gampong Mane. Di ketinggian mereka merunduk lalu mengarahkan moncong senapan ke arah jembatan yang terpaut sekitar 15 meter. Ketika 15 menit kemudian dua sepeda motor yang ditumpangi empat tentara melintasi jembatan Cot Kuala dari arah Tangse ke Geumpang, senjata menyalak. Sepeda motor yang di depan, dikenderai dua tentara berpakaian loreng, terpelanting ke semak belukar di bawah jembatan. Sementara, motor satunya lagi, yang dipacu dua tentara berpakaian sipil, berbalik ke arah Tangse.

Penyergapan tersebut dipimpin A Gani Ahmad, kini 77 tahun, komandan operasi GAM kala itu. Mereka yang berada di sisi A Gani Ahmad, antara lain Teungku Hasan Umar, Fadli, Sayuti, Amin Jalil, Keuchik Din, Sulaiman Daud, dan Saleh Maha. Tiga yang disebut pertama baru saja kembali dari pelatihan militer di Libya.

Gani menembak dengan Lee-Enfield, dan Teungku Hasan Umar menembak dengan Sten Gun.

“Satu tentara terkena tembakan di pinggang,” kata A Gani Ahmad, Rabu, 2 Agustus 2023.

30

Walaupun mengalami luka-luka, empat tentara itu berhasil meloloskan diri. Keempatnya adalah Sertu Mahyiddin, Sertu Yosef Sembiring, Kopda Wagimin, dan Kopda Sunardi. Mereka anggota Batalyon Infanteri 113.

Beberapa menit kemudian, bus Bireuen Ekspres (BE) dari arah Tangse menuju Geumpang melewati jembatan Cot Kuala. Teungku Usman, salah seorang anggota GAM yang baru saja membeli bahan peledak untuk merakit bom, turun dari bus BE setelah melihat Saleh Maha menenteng senjata dan mondar-mandir di atas jembatan itu.

Bersamaan dengan itu, hujan mengguyur deras yang disertai angin kencang, mengakhiri musim kemarau. Lalu bus melanjutkan perjalanan.

31



A Gani Ahmad

Pada Saleh Maha, Teungku Usman mengatakan bahwa Pratu Yono, anggota Koramil 17 Geumpang Kodim 0102/Pidie, dan istrinya berada di dalam bus BE yang sama dengan dirinya.

Pratu Yono dikenal sebagai pemilik sebuah kilang kayu di Geumpang. Dia sering menyita kayu penduduk yang hasil sitaan itu kemudian dijual lagi setelah menuduh penduduk yang kayunya dirampas membantu GAM di hutan. Hari itu, Pratu Yono baru pulang dari sebuah kilang kayu di Tangse untuk mengambil uang.

Jembatan Cot Kuala di Gampong Mane, Kecamatan Mane, Pidie.



Tidak peduli lagi pada empat anggota Batalyon Infanteri 113 yang meloloskan diri, menggunakan sepeda motor Yamaha RX King, Saleh Maha, Sayuti, dan Amin Jalil—ketiganya kini almarhum—mengejar bus BE dan mencegatnya di Alue Reuling, sekitar delapan kilometer dari jembatan Cot Kuala.

Saleh Maha, Sayuti, dan Amin Jalil menurunkan Pratu Yono dan istrinya dari bus. Pasangan ini semula dibawa ke Simpang Turue, 15 kilometer dari jembatan Cot Kuala. Tapi kemudian mereka dipisahkan. Pratu Yono digiring ke sebuah tubir jurang di Alue Breuh, sekitar 9,5 kilometer dari jembatan Cot Kuala. Sementara, istrinya ditawan di sebuah rumah warga di Simpang Turue.

Kabar penculikan Pratu Yono dan istrinya sampai kepada Pawang Rasyid, Panglima GAM Wilayah Pidie, yang saat itu sedang berada di kebun ubi miliknya di Simpang Turue. Pawang mengirim utusan untuk menyampaikan pesan agar Pratu Yono dibawa ke tempatnya dan jangan dieksekusi. Sebelumnya, pria yang bernama lengkap Muhammad Rasyid Meuraksa itu juga telah melarang penyeragaman anggota Batalyon Infanteri 113 di jembatan Cot Kuala.

Namun dalam kumpulan gerilyawan yang dipimpin A Gani Ahmad, terdapat gerilyawan yang baru saja pulang dari pelatihan militer di Libya atau dikenal sebagai eks Libya. Eks Libya menolak perintah Pawang Rasyid, seorang gerilyawan yang saat itu berumur 70 tahun, mantan tentara DI/TII, yang pada 1977 bergabung ke dalam GAM dan pada tahun itu diangkat menjadi Panglima Sagoe Geumpang.

Belakangan, Pawang Rasyid menjadi Panglima GAM Wilayah Pidie.

Mantan Komandan Operasi GAM, A Gani Ahmad, membantah narasi tersebut. Menurutnya, penyerangan anggota Batalyon 113 dan pembunuhan Pratu Yono merupakan perintah Pawang Rasyid. “Kalau Jono lolos, kami justru akan dimarahi Pawang Rasyid,” kata A Gani Ahmad.

Sejarawan Universitas Syiah Kuala, Muhammad Isa Sulaiman (kini almarhum), menyebut bahwa deklarator GAM, Hasan Tiro, yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Politik dalam Forum Gerakan Pembebasan Dunia dan memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Libya, Muammar Khadafi, pernah “menjadikan Libya sebagai tempat pelatihan calon pasukan komando yang akan dikirim ke Aceh untuk melanjutkan perjuangan bersenjata.”

Antara 1986-1989, secara bertahap, GAM merekrut dan mengirim ratusan pemuda Aceh mengikuti pelatihan militer di maktabah Tajura, sebuah kota di pesisir Mediterania, sekitar 23 kilometer dari Tripoli. “Sejak awal 1989 satuan bersenjata GAM eks Libya kelihatannya mulai menyusup ke daerah Aceh melalui berbagai pelabuhan demarkasi,” tulis Isa dalam *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*.

Pemerintah Orde Baru menyebut aksi-aksi GAM berupa perampasan senjata, penembakan personel TNI dan Polri, pembakaran sekolah-sekolah, serta pembakaran kantor-

kantor pemerintah yang terjadi di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur sebagai gangguan keamanan.

Kopassus menyebut GAM eks-Libya sebagai angkatan luar. “Kelompok ini adalah kelompok potensial dalam ilmu militer, tetapi tidak militan dan tidak berpengalaman,” mengutip dokumen internal Kopassus, *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*.

Berbeda dengan eks-Libya yang dianggap inkompeten pada awal 1990-an, Kopassus mengelompokkan mantan tentara DI/TII, seperti Pawang Rasyid, sebagai ideolog. Sementara, masyarakat yang membantu gerilyawan di kampung-kampung disebut sebagai angkatan dalam: klandestin atau simpatisan.

Setelah liang kubur disiapkan, Pratu Yono dieksekusi di Alue Breuh pada hari itu juga. Dia ditebas dengan parang oleh Teungku Usman. Keesokan harinya, bersama istri Pratu Yono yang belakangan dibebaskan oleh para gerilyawan, tentara membongkar tempat Yono dikuburkan. Jasadnya kemudian dipindahkan dari liang kubur tersebut.

Serangan balasan setelah pembunuhan Pratu Yono berdampak sangat mengerikan terhadap masyarakat di Geumpang, sebuah kecamatan di pedalaman Bukit Barisan, berjarak sekitar 89 kilometer dari Kota Sigli, ibukota Kabupaten Pidie. Di teritori itu, TNI menggelar lima tahun operasi paling berdarah dan kotor untuk memburu para pentolan Aceh Merdeka, termasuk Pawang Rasyid yang paling akhir dilumpuhkan.

Selama lima tahun perburuan Pawang Rasyid yang brutal, berakhir pada 20 Juni 1995, Kopassus membumihanguskan rumah-rumah warga, melakukan sejumlah pembunuhan kilat terhadap penduduk sipil, termasuk memenggal dan mamerkan dua kepala pendulang emas; menyeret warga di jalan dengan mobil hidup-hidup, dan meneror warga dengan meninggalkan mayat-mayat korban yang dituduh terlibat dalam Aceh Merdeka di sepanjang jalan Tangse-Geumpang. Semua itu dilakukan untuk membuat pasukan para komando itu lebih dekat dengan Pawang Rasyid yang, oleh Hasan Tiro, pemimpin GAM, dipuji sebagai salah seorang navigator terbaik dalam taktik gerilya.

**KETIKA** pemberondongan terhadap empat anggota Batalyon Infanteri 113 di Jembatan Cot Kuala dan penculikan serta pembunuhan Pratu Yono berlangsung, M Jalil Sulek, saat itu berumur 40 tahun, warga Dusun Simpang Turue, Gampong Mane, sedang berada Alue Kueh, sekitar dua jam berjalan kaki atau tujuh kilometer di selatan Dusun Simpang Turue. Bersama delapan warga Dusun Simpang Turue yang lain, hari itu dia sedang mengidag emas. Para pendulang emas tradisional di Geumpang biasa meninggalkan rumah untuk beberapa hari dan mendirikan gubuk di tepi sungai.

Beberapa hari kemudian, para pendulang emas itu disergap dan diberondong oleh sekelompok tentara. M Jalil selamat, sedangkan empat rekannya yang lain— M Kasem

36



Alue Kueh berjarak sekitar dua jam berjalan kaki atau tujuh kilometer di selatan Dusun Simpang Turue.

Sulek, Marhaban, M Daud, dan Do Ali Meuraksa—tewas di tempat. Nama yang disebut pertama adalah abang kandung M Jalil Sulek. Adapun Do Ali Meuraksa adalah adik kandung Pawang Rasyid.

Saudah Aleh, kini berusia 70 tahun, istri M Jalil Sulek, mengenang, suaminya menyelamatkan diri ke rumahnya di Simpang Turue. Seminggu kemudian keberadaan M Jalil terendus oleh salah seorang tenaga pembantu operasi (TPO) atau *cuak*. Si TPO meminta M Jalil melapor ke pos satuan taktis dan strategis (sattis) Simpang Turue.

“Karena takut, suami saya tidak mau melapor. Dia naik lagi ke gunung untuk mendulang emas,” kata Saudah Aleh, Kamis, 3 Agustus 2023. “Saat-saat itu, siapa saja yang

37



Saudah Aleh

dipanggil ke pos sudah pasti akan disiksa dan banyak yang tidak pulang lagi ke rumah.”

Karena tak menemukan M Jalil, Kopassus membakar rumahnya di Dusun Simpang Turue.

Pembalasan dengan taktik membakar rumah bahkan telah dimulai satu hari setelah pembunuhan Pratu Yono. Tentara-tentara gabungan dari Kompi C Yonif 113 di Kota Bakti, Yonif 113 Bireuen, dan Yonif 111, berbaris menuju Gampong Mane, yang terdiri dari tujuh dusun, lalu membumihanguskan rumah-rumah warga di tiga dusun, yakni Blang Jambo Mie, Alue Breuh, dan Simpang Turue. Saat itu, Gampong Mane masih berada dalam Kecamatan Geumpang. Saat Kecamatan Mane berdiri pada 4 Juli 2000, Gampong Mane menjadi ibu kotanya.

Sebelumnya, kehidupan di Geumpang relatif aman meski GAM melakukan pelbagai kegiatan konsolidasi dan ceramah-ceramah politik. Permusuhan ideologi berhasil diisolasi. Pada April 1990, misalnya, Pejabat Sementara Danramil 17 Geumpang, Serka Maju Ali Siagian, yang akrab disapa Pak Mojo, sebagaimana dikutip dalam *Mimbar Kekaryaannya ABRI (edisi 259, Juli 1992)*, menjalin pakta tidak saling menyerang dengan Pawang Rasyid.

Belakangan, setelah penyergapan anggota Yonif 113 dan pembunuhan Pratu Jono, perjanjian itu menyeret Mojo ke mahkamah militer. Pada 1 Juli 1992, Mahkamah Militer 01 Banda Aceh memvonis Serka Maju Ali Siagian, saat itu

Bekas rumah warga Dusun Simpang Turue yang pernah diduduki secara sepihak oleh Kopassus.



berumur 49 tahun, 14 tahun penjara. Dia dijerat pasal 1 ayat 1 angka 2 juncto pasal 13 ayat 1 angka 2 juncto pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951. Dia dianggap mendukung dan bekerjasama dengan musuh.

Untuk penduduk sipil di Geumpang, yang kebanyakan mencari nafkah dengan memanfaatkan hasil hutan, TNI mengeluarkan maklumat bahwa setiap pendulang emas, pemburu rusa, pencari rotan, dan pencari ikan kerling harus melapor ke pos sattis. Hanya mereka yang mendapatkan izin boleh ke hutan atau gunung. Mereka yang tak mendapatkan izin hanya boleh keluar rumah sejauh 50 meter.

Taktik bumi hangus dan blokade TNI menyebabkan Pawang Rasyid dan kelompoknya menyingkir ke hutan.

Salah seorang kemenakan Pawang Rasyid, Jabaruddin Ahmad, waktu itu sedang menempuh pendidikan di SMP Negeri Geumpang, menerima pesan dari ibunya, Ramlah Langkek, bahwa rumah mereka di Dusun Simpang Turue, Gampong Mane, telah dibakar tentara. Ramlah Langkek juga berpesan agar Jabar menyusul ayahnya di hutan.

“Foto ijazah SD saya diambil tentara,” kata Jabaruddin Ahmad, Rabu, 12 Juli 2023. “Saat itu, saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP.”

Sejak saat itu, Jabaruddin putus sekolah.

Masih pada Juli 1990, Kopassus menduduki sebuah rumah milik warga di Dusun Simpang Turue lalu menjadikannya sebagai pos sattis.



Jabaruddin Ahmad

**“Salah seorang TPO yang ikut dalam penyergapan Pawang Rasyid, Yanto, memberitahukan pada saya bahwa Muhammad Sabillah, yang saat itu berumur lima bulan, masih selamat di detik-detik terakhir penyergapan tersebut.”**

Jabaruddin mengenang, di pos sattis inilah TNI mulai merekrut warga untuk dilatih sebagai milisi dan akan dimanfaatkan untuk memburu kelompok Pawang Rasyid. “TNI mengerahkan warga berkumpul di lapangan,” kata pria kelahiran 1973 itu. “Dengan bersenjatakan parang dan tombak mereka diperintahkan memburu GAM di hutan. Saya beberapa kali hampir berpas-pasan dengan mereka.”

Sementara suami dan anaknya berada di hutan, Ramlah Langkek dipaksa mencari keberadaan mereka di hutan, setiap hari, dari pagi hingga petang. Seminggu sekali, dia diwajibkan melaporkan perkembangan pencarian suami dan anaknya ke pos sattis Simpang Turue.

Jabar mengatakan bahwa dia beberapa kali bertemu ibunya yang sedang mencarinya di hutan. “Ibu saya tahu posisi saya,” kata Jabar.

Namun Ramlah menutup mulutnya rapat-rapat.



42

Karena dianggap tidak berhasil menemukan persembunyian suami dan anaknya, di pos sattis Simpang Turue, kata Jabaruddin, "Ibu saya mendapatkan berbagai penyiksaan dan teror, termasuk diumpankan kepada anjing dan lutung."

Apa yang dialami M Jalil Sulek, Saudah Aleh, Ramlah Langkek, dan Jabaruddin adalah salah satu bagian dari perang rahasia dan kotor TNI selama Operasi Jaring Merah (1990-1998) di Aceh.

Amnesty International, dalam *Shock Therapy Restoring Order in Aceh 1989-1993*, mencatat pada Juli 1990, Presiden Soeharto memerintahkan pengiriman 6.000 personel militer non-organik, termasuk dua batalion Kopassus untuk menyelesaikan gangguan keamanan di Aceh. Sejak saat itu, Daerah Operasi Militer (DOM), dengan sandi Operasi Jaring Merah, berlaku efektif di Aceh. Kodam I/ Bukit Barisan adalah pelaksana operasi di wilayah Korem 001/ Lilawangsa.

Untuk memenangkan perang ini, ABRI membagi kekuatannya dalam tiga satuan tugas, yaitu satuan tugas intelijen, satuan tugas marinir, dan satuan tugas taktis dan strategis. Personel TNI Angkatan Darat (AD) dari Kopassus bertugas di satuan tugas taktis dan strategis untuk mengolasi GAM, dan satuan tugas marinir bertugas menjaga bibir pantai di Aceh.

43

Kopassus yang ditugaskan pada saat Operasi Jaring Merah tergabung dalam Tim Pase — Tim Pase-1, 2, 3, 4, dan seterusnya.

“Seluruh kegiatan Tim Pase-4 berorientasi pada operasi Satgas Aceh-III yang dilanjutkan Satgas Rencong-94 berdasarkan perintah Operasi Jaring Merah V dan dilanjutkan dengan perintah Operasi Jaring Merah VI. Dalam pelaksanaannya berperan sebagai satuan pelaksana lapangan dalam hubungan satuan taktis (pos) yang tersebar di empat wilayah Operasi Jaring Merah. Setiap pos merupakan gabungan dari satuan yang berada di bawah Satgas Rencong-94,” demikian dikutip dari dokumen *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*.

Tugas pokok Kopassus selama Operasi Jaring Merah adalah mencari dan menghancurkan tokoh-tokoh dan anggota GAM, merebut senjata musuh, membongkar jaringan klandestin GAM di kampung dan di kota, dan membongkar jaringan sindikat ganja yang dianggap sumber dana GAM.

Mengutip dokumen tersebut, kegiatan operasi dibagi dalam dua tahap.

Pertama, operasi intelijen digelar dengan penyusupan agen atau tenaga pembantu operasi (TPO) ke GAM dan pembinaan rakyat untuk menciptakan kondisi, penyergapan dan penggeledahan rumah, pendataan klandestin, dan pembentukan serta pembinaan agen.

Tahap kedua, operasi menasar anggota GAM di hutan. Kegiatannya tetap melanjutkan operasi tahap pertama sekaligus operasi tempur dengan melaksanakan

penyergapan, patroli, dan penghadangan, serta pendataan klandestin untuk pengembangan operasi lebih besar.

Dalam menghadapi gerilyawan Aceh Merdeka, Kopassus mengandalkan taktik kontraintelijen, yakni mengumpulkan semua informasi tentang musuh dengan cara memfungsikan pos satts di empat sektor yang meliputi Sektor A/ Pidie, Sektor B/ Aceh Utara, Sektor C/ Aceh Timur, dan Sektor D/ Aceh Tengah, terutama di kecamatan-kecamatan yang rawan Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka (GPK-AM) – sebutan pemerintah Orde Baru untuk GAM.

Berdasarkan sektor, pos-pos ini kemudian diurut menggunakan nama gunung: Sektor A/ Pidie diberi nama Tidar, Sektor B/ Aceh Utara dinamai Merapi, Sektor C/ Aceh Timur dinamai Merbabu, Sektor D/ Aceh Tengah diberi nama Galunggung.

Di Pidie, Pos Sattis-A Tidar/ Kota Bakti terletak di asrama TNI di Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti. Antara November- Desember 1994, Pos Sattis-A Tidar-00/ Kota Bakti ini membawahi Tidar-01 Geumpang, Tidar-02 Lueng Putu, dan Tidar-03 Tiro, dan selama periode Oktober hingga November 1995, pos-pos satts di jajaran Tidar terus meluas.

Apabila kekuatan GAM di satu kecamatan telah dilumpuhkan atau pentolannya berhasil dibunuh, pos satts di kecamatan tersebut akan berpindah ke kecamatan yang rawan GAM lainnya. Misalnya, Pos Sattis Tidar-01 yang sebelumnya berada di Mane dan Geumpang, beralih ke

Blang Pandak, Kecamatan Tangse, sekitar 20 kilometer di barat laut Geumpang.

Antara 1990-1998, di Sektor A/ Pidie saja Kopassus diperkirakan telah mengoperasikan lebih dari 50 pos sattis, salah satunya Rumoh Geudong, di Gampong Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga.

Dikendalikan oleh seorang perwira pertama lulusan Akademi Militer (Akmil) yang berusia 30-an dari kesatuan Kopassus, pos-pos sattis di atas diisi dengan jumlah personel Kopassus yang bervariasi, dua atau empat personel.

Selebihnya adalah tentara-tentara dari Batalyon Infanteri (Yonif) 113, Yonif 132, dan Yonif 133, dan tentara-tentara organik dari kodim dan koramil tempatan. Terdapat lima hingga delapan anggota TNI di satu pos sattis.

Saat melancarkan operasi tempur, Kopassus didukung oleh kesatuan tempur dari Yonif 113, Yonif 132, dan Yonif 133.

Pos Sattis-A Tidar/ Kota Bakti, selain berada di dalam kompleks asrama TNI, juga hanya berjarak delapan menit berkendara dari Kompi C Yonif 113.

Dalam perimeter pos sattis di tingkat kecamatan, satu satuan setingkat peleton (SST) tempur juga ikut bermarkas.

Di hampir setiap pos sattis, Kopassus merekrut warga sipil dan menjadikan mereka sebagai tenaga pembantu operasi (TPO) atau anak panah. Orang Aceh menyebut mereka *cuak*.

Berdasarkan hierarki atau rantai komando, pos-pos sattis di empat sektor di atas bertanggung jawab kepada dan

menerima perintah dari Pos Sattis Rancong yang bermarkas di kompleks PT Arun/ ExxonMobil, di Kota Lhokseumawe. Dipimpin oleh seorang kapten, Pos Sattis Rancong adalah pusat komando Operasi Jaring Merah bagi satuan tugas taktis dan strategis, sekaligus menjadi tempat komandan Satgas Aceh I, II, dan III serta komandan Satgas Rencong-94 dan seterusnya mengendalikan operasi. Tidak berbeda dengan pos-pos sattis di bawahnya, Rancong juga difungsikan sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, dan tempat eksekusi para tawanan yang ditangkap secara sewenang-wenang.

Bekas Pos Sattis Rancong di Lhokseumawe.



**SUATU HARI** pada 1991, M Jalil Sulek dan Ali Yakob, warga Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, ditembak Kopassus yang sedang melakukan operasi di hutan. Mereka ditembak di Alue Payeut, sekitar dua kilometer dari Alue Kueh, tempat empat warga sipil meninggal karena ditembak satu tahun sebelumnya. Bagi Jalil ini adalah pemberondongan yang kedua kalinya.

“Suami saya sebenarnya terkena tembakan di kaki dan masih bisa diobati,” kata Saudah Aleh. “Ali Yakob yang meninggal di tempat. Tapi leher suami saya dan leher Ali digorok Kopassus hingga terpisah dengan badan.”

Saudah mendapat informasi itu dari salah seorang TPO atau *cuak*, Yanto.

Yanto, sebut Saudah, yang menuntun Kopassus ke Alue Payeut.

Setelah membunuh suaminya, Saudah menduga Kopassus dan TPO juga merampas 19,8 gram emas yang selama setahun didulang oleh M Jalil Sulek.

Setelah digorok, Kopassus meninggalkan badan Jalil dan Ali di hutan, sedangkan kepala mereka diturunkan ke Dusun Simpang Turue, Gampong Mane, lalu dipamerkan kepada masyarakat di pos sattiv Simpang Turue. Mata kedua mayat yang terpejam ditopang dengan batang korek api agar tetap terbuka. Dua batang rokok masing-masing diselipkan di dua lubang hidung Ali Yakob dan M Jalil Sulek. Selain itu, masing-masing satu batang rokok lainnya juga diselipkan di kedua bibir mereka. Agar kekejian ini sempurna, Kopassus

48



Hasballah M Jalil

mengerahkan paksa warga di semua dusun di Gampong Mane menonton dua kepala tersebut.

Hasballah M Jalil, anak kedua pasangan M Jalil Sulek dan Saudah Aleh, masih berumur 14 tahun saat ia menyaksikan dua kepala tersebut untuk memastikan apakah benar “kepala itu adalah kepala ayah saya”.

“Tentara menyediakan mobil untuk warga agar mereka menyaksikan kepala ayah saya. Angkutan-angkutan umum yang melintas di jalan juga dihentikan. Penumpang angkutan umum diminta menyaksikan kepala ayah saya,” kata Hasballah M Jalil, kini 47 tahun, Rabu, 12 Juli 2023.

Setelah dua hari dipertontonkan di pos sattiv Simpang Turue, Kopassus memindahkan kepala M Jalil Sulek dan Ali

49



Sebelum Puskesmas Geumpang berdiri, tempat ini adalah sebuah mess guru yang pernah diubah menjadi pos sattis.

Yakob sejauh enam kilometer ke Lhok Kuala, Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang, di sebuah mess guru yang telah diubah menjadi pos sattis. Tujuannya sama, untuk dipertontonkan kepada masyarakat selama enam hari. Di bekas pos sattis itu kini berdiri Puskesmas Geumpang.

Belakangan, kepala M Jalil Sulek dan Ali Yakob dikembalikan pada keluarga. “Samion (TPO) yang mengembalikan kepala suami saya ke rumah. Kepala suami saya dimakamkan di pemakaman umum Simpang Turue, sementara kepala Ali Yakob dimakamkan di gampongnya di Leupu, Geumpang,” kata Saudah. “Badan suami saya dan badan Ali Yakob tetap berada di hutan dan dimakamkan di Alue Payeut.”

Selang beberapa bulan kemudian, Kopassus menawan dan menangkap Saudah Aleh di pos sattis di kantor Camat Geumpang selama empat malam. Ia disekap bersama anaknya yang saat itu berumur 14 bulan, M Nasir. “Di sana, saya dan anak saya yang ada dalam gendongan dimasukkan ke dalam kandang anjing,” tutur Saudah Aleh. “Kandang itu, sebelumnya, ditempati bibi saya, Tiaman. Saat Tiaman keluar dari kandang itu, giliran saya yang dimasukkan.”

Tiaman, kini berumur 83 tahun, adalah adik kandung Pawang Rasyid.

Kopassus menuduh Saudah berbelanja kebutuhan GAM. “Padahal saya membeli setengah kilogram garam untuk keperluan dapur,” kata Saudah.

Kutu-kutu anjing, sebut Saudah, menempel di tubuh anak bungsunya, M Nasir.

Pada 31 Januari 2016, M Nasir meninggal dunia karena hanyut di sungai.

Sekitar 10 menit di kandang anjing, Saudah diinterogasi di salah satu ruangan kantor Camat Geumpang. Selama interogasi, Kopassus menyiksa Saudah. “Saya dipukul di wajah, di bahu, dan di kaki dengan kayu. Saya juga hendak disundut dengan empat batang rokok, tapi saya ambil dan saya remas rokok itu. Saat mereka hendak membakar saya dengan korek api, saya juga ambil korek itu lalu saya buang,” ucapnya.

Hari ketiga Saudah dan anaknya ditawan, adik Saudah, Saribanun, kini 59 tahun, diizinkan untuk membawa pulang



Kantor Camat Geumpang yang pernah menjadi Pos Sattis Tidar-01 Geumpang.

M Nasir. “Keesokan harinya saya juga diizinkan untuk pulang,” tutur Saudah.

Sekitar setahun setelah memenggal kepala M Jalil Sulek dan Ali Yakob serta memamerkannya kepada umum, pada suatu malam 1992, Kopassus mengeksekusi Banta Lidan, saat itu berumur 37 tahun, Wakil Komandan Operasi GAM. Banta Lidan adalah adik Saudah.

Anita Banta Lidan, 43 tahun, anak sulung pasangan Banta Lidan dan Ruhul Aflah, 60 tahun, masih duduk di bangku kelas 5 SD Negeri Simpang Turue saat ayahnya ditembak dan tubuhnya diletakkan di tepi jalan Simpang Keune, Geumpang.

52

Kopassus beberapa kali mengeledah rumahnya di Simpang Turue. “Karena ayah tidak pulang-pulang, rumah kami dibakar. Setelah rumah kami dibakar,” kata Anita, Kamis, 3 Agustus 2023, “tentara melarang semua keluarga kami, termasuk nenek kami sendiri, untuk menampung kami.”

Sebaliknya, Kopassus mengarahkan istri dan empat anak Banta Lidan ke sebuah rumah yang terletak sekitar 25 meter di depan pos sattis Simpang Turue. Kopassus merampas rumah yang ditempati istri dan anak Banta Lidan dari pasangan suami-istri Abdullah Arif dan Cut Fauziah.

Sejak istri dan anaknya disandera, Banta Lidan sering berada di pinggir jalan Dusun Simpang Turue hingga akhirnya



53

Anita Banta Lidan

dia tertangkap. Banta disekap di pos sattis Simpang Turue selama tiga bulan.

Sementara Banta Lidan diinterogasi di pos sattis Simpang Turue, Kopassus kerap mengikat Ruhul Aflah, istri Banta Lidan, sepanjang hari di sebatang pohon kelapa yang menjulang di halaman pos. Kopassus juga memaksa Ruhul dan keempat anaknya menghabiskan malam di pos sattis tersebut untuk mendengar jeritan Banta Lidan yang sedang disiksa.

“Setiap sore, kami harus berada di pos dan tidur di sana,” kenang Anita Banta Lidan. “Saat itu, umur saya 11 tahun. Adik saya, Darkasyi, berumur sembilan tahun; Nurlela berumur lima tahun dan Azizah berumur tiga tahun.”

Belakangan, Darkasyi bergabung dengan GAM. Menjelang kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, Darkasyi meninggal dunia karena ditembak.

Pos sattis Simpang Turue merupakan rumah warga dusun setempat yang diduduki paksa oleh Kopassus pada 1990. Berkonstruksi dan berdinding kayu, di tengah rumah itu terdapat sebuah ruangan sebesar lapangan bola voli yang menghubungkan bagian depan dan belakang rumah. Ruang tengah itu hanya berlantai tanah. Sisi barat tertutup dinding kayu setinggi lima meter, sementara bagian timur dilapisi dinding dapur sepanjang empat meter dengan ketinggian dua meter dan hanya beratapkan beberapa lembar seng. Di ruang tengah tanpa atap dan berlantai tanah itulah Anita, ibunya, dan tiga adiknya tidur selama tiga bulan



Kini, bangunan rumah bekas pos sattis Simpang Turue sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah bekas-bekas pondasi dan lantai tanah. Pemilik rumah telah membangun rumah baru di belakang rumah yang dulu pernah menjadi pos sattis.

ayahnya disekap dan diinterogasi. Mereka berbagi tempat dengan seekor lutung yang diikat di tiang di ruang tengah tersebut.

Kopassus tidur di ruangan depan seluas 8 x 12 meter.

Adapun tempat ruang penyekapan berada di bagian belakang seluas 4 x 8 meter. Di belakang rumah itu, Kopassus mendirikan sebuah balai penjagaan. Di depan rumah yang menghadap jalan Tangse-Geumpang, Kopassus juga mendirikan balai serupa. Di balai itulah pada 1991 Kopassus memamerkan kepala M Jalik Sulek dan Ali Yakob.

Setelah menduduki selama dua tahun, pada 1992 Kopassus mengembalikan rumah itu kepada pemiliknya. Pada 1993, Kopassus hanya memfungsikan satu pos sattis di

Geumpang dan Mane, yakni di kantor Camat Geumpang, di Lhok Kuala, Gampong Bangkeh.

Kini, bangunan rumah bekas pos sattis itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah bekas-bekas pondasi dan lantai tanah. Pemilik rumah telah membangun rumah baru di belakang rumah yang dulu pernah menjadi pos sattis.

Setelah tiga bulan dalam tawanan Kopassus, Banta Lidan dan keluarganya dibebaskan. Karena rumah mereka telah dibakar, Banta Lidan berencana membangun sebuah rumah baru karena enggan tinggal berdekatan dengan pos sattis Simpang Turue.

Namun pembebasan itu bukan tanpa syarat. Banta Lidan harus menuntun Kopassus memburu Pawang Rasyid di hutan.

Syammaun, anak pertama pasangan Pawang Aleh dan Zenabah, menceritakan bahwa ia, bersama adiknya, Banta Lidan, dua kali digiring oleh Kopassus ke hutan untuk menemukan tempat persembunyian Pawang Rasyid.

Mula-mula, kata Syammaun, mereka berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Dusun Simpang Turue menuju pos sattis di kantor Camat Geumpang. Saat itu, di sebelah kanan pos sattis itu terdapat sebuah tanah lapang yang berfungsi sebagai landasan helikopter.

Lalu helikopter menerbangkan mereka dan diturunkan di Lutueng, sebuah kemukiman di Mane yang jika ditempuh dari Dusun Simpang Turue hanya berjarak sekitar lima kilometer. Dari Lutueng ketiganya dilepaskan ke Krueng Lunieh, Gumue, sebuah rimba belantara, sementara tentara



Syammaun

mengekor di belakang mereka. “Jumlah tentara sekitar tiga peleton. Kesatuannya Siliwangi,” kata Syammaun, Kamis, 3 Agustus 2023. “Dua hari kami dibawa operasi ke Gumue.”

Syammaun mengenang, dia berjalan paling depan dan tentara membebaninya dengan sebuah tas ransel berisikan radio.

“Di hutan, saya berjalan mengikuti jejak gajah,” kata pria kelahiran 1 Juli 1955 itu.

Saat mereka menemukan seongkah kayu besar yang telah tumbang dan membusuk, Syammaun diperintahkan melongok ke celah-celah tumpukan kayu. Saat itulah sekawanan tawon menyerang lehernya. Ia menjerit kesakitan dan berlari.

Seorang tentara berteriak, "Jangan lari!"

Karena penasaran, tentara itu juga melongok ke dalam celah kayu dan wajahnya pun dimangsa tawon.

Tentara yang wajahnya digigit tawon itu menghunus sangkur dan meletakkan senjata tajam itu di leher Syammaun.

"Tapi komandan mencegahnya," kata Syammaun.

Hari itu mereka gagal menemukan persembunyian Pawang Rasyid.

Pada operasi kedua Syammaun dan Banta Lidan digiring Kopassus untuk menyisir kawasan Krueng Geupo selama seminggu. Namun juga tidak ditemukan jejak Pawang Rasyid di sana.

Di terbitan internal ABRI, *Mimbar Kekaryaannya ABRI (edisi: 259-Juli 1992)*, tertera bahwa pada Agustus 1991, Pangdam I/ Bukit Barisan HR Pramono menyerahkan 68 mantan tawanan GPK kepada Wakil Gubernur Aceh, T Johan. Mereka yang telah dianggap insaf dan mendapatkan indoktrinasi ulang ini dikembalikan ke tempat asal mereka masing-masing, yakni Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Besar, dan Pidie.

"Sebelumnya 833 mantan anggota GPK telah dikembalikan ke masyarakat, yang dilaksanakan pada akhir 1990 secara bertahap: gelombang pertama 40 orang, gelombang kedua 84 orang, gelombang ketiga 77 orang, gelombang keempat 127 orang, gelombang kelima 126 orang, dan gelombang keenam 11 orang," demikian tertulis dalam *Mimbar Kekaryaannya ABRI edisi 259-Juli 1992*.

"Mantan anggota GPK tersebut layak mendapat pengampunan dan dikembalikan ke masyarakat setelah melalui berbagai dasar pertimbangan," demikian *Mimbar Kekaryaannya ABRI*.

Saat itu, Operasi Jaring Merah sudah memasuki tahun kedua. Semula, pemerintah Indonesia berharap operasi itu tuntas dalam waktu enam bulan, namun "Operasi Jaring Merah yang diakhiri pada 31 Desember 1990 diperpanjang lagi," tulis M Isa Sulaiman dalam *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*, "Kolonel Sofyan Efendi (Danrem Lilawangsa) ditarik menjadi Kepala Staf Kodam I untuk mendampingi Mayjen HR Pramono (Pangdam Bukit Barisan), sementara jabatan yang ditinggalkannya diisi Kolonel Syarwan Hamid."

Target TNI tampaknya meleset jauh karena Operasi Jaring Merah terus diperpanjang dari tahun ke tahun hingga 1998: Jaring Merah I, II, III, IV, V, VI, dan seterusnya. Sementara itu, pada masa Mayjen HR Pramono menjabat Pangdam Bukit Barisan dan Kolonel Syarwan Hamid menjabat sebagai Danrem Lilawangsa, operasi kontraintelijen di lapangan bertambah brutal, bertolak belakang dengan propaganda *Mimbar Kekaryaannya ABRI* yang menyatakan bahwa mantan gerilyawan yang telah taubat diampuni.

Faktanya, mereka yang telah dibebaskan satu per satu dieksekusi mati! Mayat-mayat mereka diletakkan di sepanjang jalan secara mencolok. Itulah yang dialami Banta

Lidan, Bugeh, Ibrahim M Yatim, serta puluhan warga lainnya di Mane dan Geumpang.

Setelah dimanfaatkan dua kali dalam operasi pemburuan Pawang Rasyid dan gagal, pada suatu malam, saat sedang menimbun halaman rumah baru yang akan ia bangun, Banta Lidan didatangi Kopassus dari pos sattis di Simpang Turue. “Wakil komandan pos yang datang, Sutrisno,” tutur Anita. “Komandan pos saat itu Pono.”

Sutrisno meminta Banta Lidan ke pos sattis Simpang Turue. Anita dan ibunya, Ruhul Aflah, mendesak Banta Lidan untuk melarikan diri ke gunung.

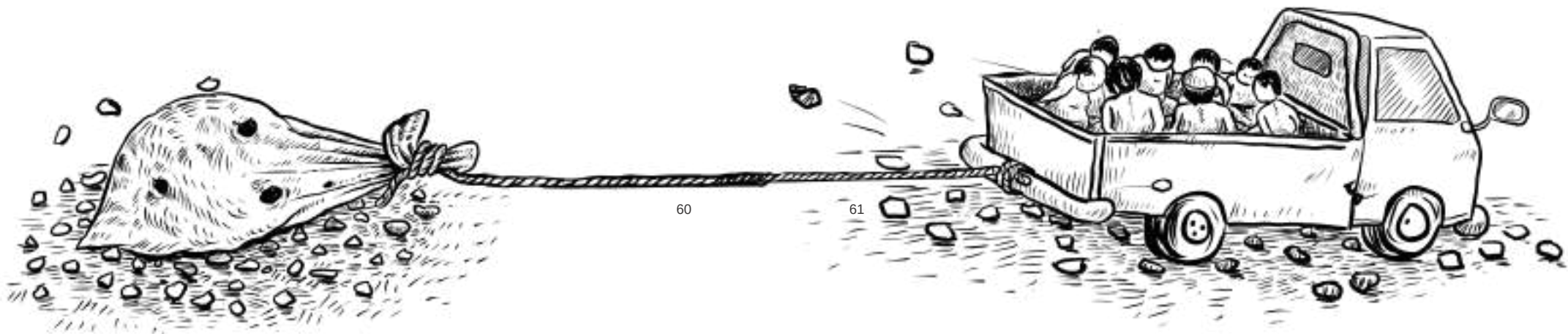
“Kalau ayah melarikan diri, Anita, ibu, dan adik-adik akan mereka bakar hidup-hidup di dalam rumah,” kata Anita, menirukan ucapan Banta Lidan padanya waktu itu.

Malam itu, sekitar pukul 20.00 WIB, di pos sattis Simpang Turue, Kopassus menaikkan Banta Lidan dan enam warga Dusun Simpang Turue lainnya, termasuk Bugeh, ke dalam sebuah mobil pikap Mitsubishi L-300, dengan tangan terikat. Pikap itu mula-mula bergerak dari

pos sattis Simpang Turue ke Keude Geumpang sejauh tujuh kilometer. Tiga mobil Daihatsu Taft mengawal pikap itu. Dari Geumpang, pikap dan tiga Daihatsu Taft lalu kembali lagi ke Dusun Simpang Turue. Dari Simpang Turue, pikap dan tiga Daihatsu Taft itu melaju ke arah Lutueng sejauh lima kilometer. Kopassus mengeksekusi kilat tujuh warga Simpang Turue dan meninggalkan jasad mereka di jalan di depan SMK Negeri Mane, Cot Batee Kleng, Blang Dalam, Simpang Keune, Pucok, Blang Jambo Mie, dan Lutueng.

Pada pukul 23.00 WIB, Kopassus mengeksekusi Banta Lidan. Dia ditembak di bawah dagu dan dekat ketiak. Dengan tangan terikat tali, jasadnya diletakkan di Simpang Keune, tujuh kilometer dari Simpang Turue.

“Ayah baru meninggal pada pukul 11 siang. Sepanjang malam dia memanggil nama saya,” kenang Anita. “Jasad ayah baru boleh dipindahkan pada pukul 12 siang.”





Dusun Simpang Turue, Gampong Mane, Kecamatan Mane, Pidie.

Adapun jasad Bugeh, dieksekusi pada malam yang sama, diletakkan di pinggir turunan jalan Cot Batee Kleng. Bugeh adalah paman Banta Lidan—adik Zenabah.

Kembali lagi ke pos sattis Simpang Turue pada pukul 20.00 WIB. Sesaat sebelum tujuh warga Dusun Simpang Turue dinaikkan ke dalam bak terbuka pikap untuk dieksekusi, khusus Ibrahim M Yatim dimasukkan ke dalam karung goni. Karung goni itu lalu diikat di belakang bak terbuka pikap tersebut. Ketika pikap bergerak, melintasi rute-rute tempat pembunuhan kilat terhadap tujuh warga berlangsung, Ibrahim M Yatim yang terkurung di dalam karung goni terseret hidup-hidup sejauh 21 kilometer. Ketika keluarga Ibrahim membawa pulang jasad Ibrahim, jasadnya telah remuk dan tak bisa lagi dimandikan.

62

Istri Ibrahim, Juriah, adalah keponakan Pawang Rasyid.

Sehari setelah eksekusi kilat tujuh dari delapan warga Dusun Simpang Turue, Gampong Mane, Syammaun meninggalkan dusunnya. Untuk seterusnya dia menetap di Gampong Beuracan, Kecamatan Meureudu, yang jauhnya sekitar 120 kilometer dari Gampong Mane.

Eksekusi kilat dan meninggalkan jasad mereka yang dituduh terlibat GAM di tempat tertentu terus terjadi antara 1991-1993. Amnesty International, dalam *Shock Therapy Restoring Order in Aceh 1989-1993*, menyebut tujuan diletakkannya mayat-mayat itu di tempat-tempat umum untuk memberikan pesan pada yang lain agar tidak bergabung dan tidak mendukung GAM. Dengan kata lain, bahkan setelah meninggal pun, korban masih dieksploitasi untuk kepentingan operasi militer.

Beberapa tahun setelah pembunuhan delapan warga Dusun Simpang Turue, operasi perburuan terhadap Pawang Rasyid di hutan Geumpang masih terus berlangsung, setidaknya rutin dilakukan sekali dalam sebulan.

Di dalam dokumen internal Kopassus, *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*, termaktub bahwa pada 3 November 1994, Pos Tidar-01 Geumpang “meluncurkan keluarga GPK-AM sebanyak enam orang selama delapan hari untuk mencari kedudukan kelompok GPK-AM yang masih berada di daerah Krueng Geupo dengan hasil nihil”.

63

Dan berselang beberapa minggu kemudian, “pada 25 November 1994, Pos Tidar 01/Geumpang meluncurkan kembali keluarga GPK-AM selama sembilan hari di daerah Alue Sarah Panah dan berhasil menemukan tempat bersembunyi GPK-AM tetapi kosong,” demikian dikutip dari *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*.

**PAWANG ALEH** dan Zenabah memiliki sembilan anak. Syammaun adalah anak pertama; Saudah anak kedua, Banta Lidan anak ketiga, dan Bransyah anak ketujuh. Pawang Aleh adalah abang kandung Pawang Rasyid.

Pada Ramadan 1995, Kopassus menembak mati Bransyah, saat itu berumur 26 tahun.

Hari itu, 11 Februari 1995, Bransyah, Jabaruddin, dan Abu Bakar, saat itu berumur 26 tahun, turun gunung mencari persediaan logistik. Di sebuah kebun mereka bertemu M Husen, warga Gampong Keune, yang sedang menunggu durian jatuh di kebunnya. Tiga gerilyawan ini meminta bantuan kepada M Husen.

Di luar dugaan, kata Jabar, “M Husen justru membocorkan keberadaan kami pada TPO atau panah Kopassus, Din Sabon.”

Lalu Din Sabon meneruskan informasi tersebut kepada Kopassus di pos sattis.



Mengutip dokumen internal TNI, *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*, demi meyakinkan informasi yang didapat agennya, Pos Tidar-01 Geumpang memanggil M Husen ke pos yang saat itu bertempat di kantor Camat Geumpang.

Keesokan harinya, Minggu, 12 Februari 1995, enam Kopassus di Pos Tidar-01 Geumpang, yang diperkuat dua tentara dari SST Yonif 132 serta dituntun dua penunjuk jalan, menuju Cot Sula. Tim ini dipimpin oleh Lettu Dadang Hendrayudha—saat itu Komandan Pos Tidar 01-Geumpang.

Pada hari yang sama, tiga gerilyawan kembali ke kebun M Husen ingin mengambil bantuan yang telah dijanjikan sehari sebelumnya. M Husen berdiri di tempat terbuka dan kepada dua gerilyawan, Bransyah dan Abu Bakar, dia berkata bahwa tempat itu aman. Mengetahui bahwa musuh tidak bersenjata, Kopassus ingin menyergap mereka hidup-hidup. Namun begitu Kopassus mendekat, kedua gerilyawan berusaha melarikan diri. Kopassus Tidar-01 melepaskan tembakan. Bransyah roboh, sementara Abu Bakar berhasil lolos. Jabaruddin, yang memantau di balik pepohonan dan semak-semak, menyingkir dari tempat tersebut.

Dalam operasi penyergapan itu, sebagaimana dicatat dalam *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*, Tidar-01 merampas dua ransel plastik, dua senter, dua kilogram beras, dua selimut, dua kaos kaki, dua kain sarung, dua celana pendek, dua kaos oblong, dua celana dalam, dua piring, satu cangkir, satu panci, dua sikat gigi, dua odol, dua botol minyak goreng, satu plastik ikan kering, dua tenda plastik, satu radio telesonic dua band, satu bungkus garam dan bumbu masak, serta lima alat pancing.

Beberapa bulan setelah penyergapan itu, Komandan Pos Sattis Tidar 01-Geumpang, Lettu Dadang Hendrayudha, dinaikkan pangkat menjadi kapten dan ditunjuk menjadi Komandan Sattis A Tidar/ Kota Bakti.

Blokade dan pengerahan agen tampaknya telah membuat kelompok Pawang Rasyid terdesak. Sekitar dua bulan setelah tewasnya Bransyah, Jabaruddin dan abangnya,

Abdullah Arif; ayahnya, Muhammad Meuraksa; dan Saleh Maha turun lagi ke permukiman untuk mencari logistik. Naas, bulan itu Abdullah Arif tertembak, sementara Jabaruddin ditangkap. Saleh Maha dan Muhammad Meuraksa berhasil lolos.

“Saya ditawan satu malam di Pos Geumpang, lalu keesokan paginya saya dibawa ke Lameulo (Pos Sattis Sektor A/ Kota Bakti),” kata Jabaruddin.

Bersama Jabar ikut ditawan Saudah Aleh dan Tiaman, adik Pawang Rasyid. Sebelum dibebaskan, Kopassus menahan mereka selama seminggu di Pos Sattis Sektor A/ Kota Bakti, berjarak sekitar 78 kilometer dari Geumpang.

“Tapi kami dikenai wajib lapor ke pos sattis Lhok Kuala, di kantor Camat Geumpang,” sebut Jabaruddin yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah berulang kali ditangkap dan mengalami pelbagai penyiksaan di pos sattis Simpang Turue (Mane), Lhok Kuala (Geumpang), Pulo Bungong (Tangse), dan Lameulo (Kota Bakti).

Sejak saat itu, Jabaruddin tak lagi bersama ayahnya, Muhammad Meuraksa, dan Pawang Rasyid yang masih bertahan di hutan.

Pada pertengahan Juni 1995, Nurman A Rahman, warga Gampong Turue Cut, kini 70 tahun, melapor ke Pos Tidar-01 Geumpang. Kepada Kopassus dia mengemukakan rencananya mendulang emas di Krueng Geupo dan diizinkan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Jabaruddin, yang baru dilepaskan dari Pos Sattis Sektor A/Kota Bakti dan



**Nurman A Rahman**

tidak lagi bersama kelompok Pawang Rasyid di hutan, memperhatikan 12 Kopassus bersenjata lengkap berkumpul di rumah Yanto, salah seorang TPO, di Simpang Turue. Yanto sehari-hari dikenal sebagai pencari kayu gaharu dan pencari ikan kerling.

Jabaruddin makin cemas saat melihat Zainal mondar-mandir dengan barang belanjaan. Menurut Jabar, gerak-gerik Zainal tidak seperti biasanya. Zainal adalah anak Marhaban, salah seorang pendulang emas yang tewas ditembak pada Juli 1990 di Alue Kueh. Zainal dipekerjakan sebagai tukang masak di Pos Sattis Tidar -01 Geumpang pada 1992. Saat itu dia berumur 20 tahun. Bahwa Kopassus

68

merekruit dan mempekerjakan paksa anak-anak di Dusun Simpang Turue yang ayah mereka telah dibunuh juga dialami Ibrahim. Ayah Ibrahim, Bugeh, dieksekusi pada 1992, dan jasadnya diletakkan di turunan jalan Cot Batee Kleng. Ibrahim mulai dipekerjakan di dapur Pos Tidar-01 Geumpang pada 1993. Saat itu dia berumur 23 tahun.

Jabar mengadang dan bertanya pada Zainal apakah Kopassus akan menggelar operasi ke hutan. “Tapi Zainal,” kenang Jabar, “menutupi rencana operasi itu.”

Jabar mengatakan bahwa andai dia mengetahui rencana operasi Kopassus lebih awal, dirinya akan naik ke gunung dan memberitahukan Pawang Rasyid agar segera menyingkir dari persembunyiannya. “Saya telat satu malam,” kata Jabar. “Sampai sekarang saya masih menyesali hal itu.”

Keesokan harinya, Nurman mendirikan gubuk di tepi Sungai Krueng Geupo, mengidang emas bersama tiga rekannya.

Krueng Geupo merupakan daerah aliran sungai yang sama dengan Alue Kueh dan Alue Payeut, hulunya di Sungai Cot Kuala dan mengalir ke Sungai Teunom, Aceh Jaya.

Nurman berjarak sekitar 3 kilometer dari Lhok Tumbok, tempat persembunyian Pawang Rasyid di Krueng Geupo. Saat sedang mengidang itulah, Nurman melihat M Ali atau yang akrab disapa Pawang Ali dan anaknya, M Amin, melintasi pinggir sungai tempat Nurman mengidang emas. Keduanya berasal dari Gampong Turue Cut. Ayah dan anak itu memanggul jala ikan kerling.

69



70

“Pawang Ali,” kata Nurman, Selasa, 25 Juli 2023, “adalah pawang rusa dan ikan kerling.”

Tidak lama kemudian, Nurman juga bertemu dengan dua pencari kayu gaharu: Yanto dan Mizar.

“Amin dan Yanto yang menemukan tempat kami mendulang emas,” kata Nurman.

Menurut Nurman, berbeda dengan warga lainnya di Geumpang dan Mane, Pawang Ali, M Amin, Mizar, dan Yanto, bebas berkeliaran di gunung tanpa harus melapor ke pos sattis.

Nurman mengatakan bahwa adalah dua pencari kayu gaharu, Yanto dan Mizar, yang menemukan tempat persembunyian Pawang Rasyid. “Mereka semula menemukan bekas di Kuala Rimueng,” tutur Nurman.

Hal serupa juga dikatakan A Gani Ahmad, yang waktu itu baru tiga hari meninggalkan gubuk Pawang Rasyid di Lhok Tumbok, Krueng Geupo.

“Dua bulan sekali saya ke tempat Pawang di Mane. Sebaliknya, Pawang juga sering berada di Komando Tiro di Blang Sala Alue Puasa di Gampong Blang Keudah,” kata Gani Ahmad.

Gani Ahmad, yang sebelumnya menemani Pawang Rasyid memancing ikan di Kuala Rimueng, sekitar 100 meter dari Lhok Tumbok, mengatakan usai memancing ikan, Pawang Rasyid menarik rotan untuk digunakannya sebagai tali menjemur pakaian. “Bekas tarikan rotan dan duri-duri rotan di tanah itulah yang diikuti *cuak* hingga mereka menemukan pondok Pawang Rasyid,” tutur Gani Ahmad.

71

Setelah menemukan tempat persembunyian Pawang Rasyid, Nurman menuturkan, Yanto dan Pawang Ali turun ke Geumpang. “Mereka lalu melaporkan tempat persembunyian Pawang Rasyid pada Kopassus,” sebut Nurman.

Adapun M Amin dan Mizar bertahan di hutan. “Tapi,” tambah Nurman, “mereka tidak berada di satu gubuk bersama kami selama di hutan.”

Nurman bertanya pada M Amin di mana mereka mendirikan gubuk.

“Tapi Amin,” kata Nurman, “tidak memberitahukan hal itu.”

Dua hari kemudian, sekitar pukul 06.00 WIB, Nurman melihat satu regu Kopassus mendekati mereka di tepi sungai. “Yanto bersama mereka. Walau dia memakai sebo, saya tetap bisa mengenalinya. Pawang Ali tidak naik lagi ke gunung bersama mereka,” kata Nurman.

Kopassus melarang Nurman dan tiga rekannya turun ke gampong. Namun, kata Nurman, larangan itu tidak berlaku bagi M Amin, Mizar, dan Yanto.

“Kata Kopassus, ‘Kalau Pawang Rasyid tidak ada lagi di tempat persembunyiannya atau lolos, kalian kami habisi,’” sebut Nurman.

Tiga puluh menit kemudian terdengar suara salak senjata.

“Selain suara letusan senjata, kami mendengar dua dentuman seperti bunyi granat,” kata Nurman.

Satu jam kemudian, ketiga pendulang emas itu mendengar raungan helikopter.

“Setelah helikopter meninggalkan hutan, saya dan tiga rekan lainnya pergi ke tempat persembunyian Pawang Rasyid,” tutur Nurman.

Saat mengikuti arah bunyi senjata dan helikopter, Nurman menemukan M Amin, yang saat itu masih berada di gunung, sedang membersihkan jejak kaki Kopassus dengan cara menutupi permukaan tanah dengan dahan-dahan kayu. Tapi Nurman tetap bisa menemukan titik penyergapan Pawang Rasyid.

Dalam operasi penyergapan itu, Pawang Rasyid, 73 tahun; Saleh Maha, Muhammad Meuraksa, Cut Fauziah; Nasrullah, seorang balita berusia 5 tahun; dan Muhammad Sabillah, bayi berusia 5 bulan, meninggal dunia.

“Saya menguburkan sisa otak bayi yang ditembak di tempat itu,” kenang Nurman.

Jenazah Pawang Rasyid dan lima lainnya, kata Nurman, diterbangkan dengan helikopter.

Jabaruddin mengatakan bahwa Nasrullah dan Muhammad Sabillah adalah anak abangnya, Abdullah Arif, dan Cut Fauziah. “Muhammad Sabillah lahir di hutan,” kata Jabaruddin.

Rumah pasangan suami-istri ini pernah ditempati istri dan empat anak Banta Lidán sebelum Banta Lidán tertangkap dan disekap di pos sattu Simpang Turue selama tiga bulan.

M Amin membenarkan bahwa ia berada di Krueng Geupo saat Pawang Rasyid disergap, tapi ia membantah jika dirinya

dan ayahnya, Pawang Ali, disebut terlibat dalam operasi tersebut. “Yanto dan Mizar, pencari kayu gaharu, yang membocorkan tempat Pawang Rasyid di Krueng Geupo pada Kopassus,” kata M Amin, Selasa, 25 Juli 2023.

Pawang Ali meninggal dunia di usia 89 tahun sekitar enam bulan yang lalu.

Dalam *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*), disebut bahwa pada 11 Juni 1995, Pos Sattis Tidar-01 Geumpang mengutus dua tenaga pembantu operasi (TPO) ke Krueng Geupo untuk mencari tempat persembunyian Pawang Rasyid selama 10 hari. Tujuh hari kemudian, pada 17 Juni 1995, dua TPO ini menemukan jejak di Krueng Teunom lalu mengikuti jejak tersebut. Dari jarak 100 meter, sebagaimana tertulis dokumen itu, dua TPO ini menemukan sebuah gubuk dan mendengar suara bayi dan suara perempuan.

Keesokan harinya, pada 18 Juni 1995, dua TPO ini turun dari gunung dan melaporkan hal itu pada Danpos Tidar 01-Geumpang, Letda Parno. Letda Parno kemudian melaporkan penemuan tempat persembunyian Pawang Rasyid pada Komandan Pos Sattis-A Tidar/ Kota Bakti, Kapten Dadang Hendrayudha. Komandan Satgas Rencong-94, Kapten Eko Margiono, menerima informasi ini pada 19 Juni 1995. Lalu Kapten Eko Margiono memberikan petunjuk dan taktik bagaimana penyergapan itu harus dilakukan pada Kapten Dadang Hendrayudha.

Komandan Pos Sattis-A Tidar/ Kota Bakti, Kapten Dadang Hendrayudha, adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988. Dia adalah salah seorang anggota Tim Mawar, tim yang menculik 22 aktivis pro-demokrasi pada medio 1997-1998. Sembilan aktivis kembali, sedangkan 13 lainnya masih hilang sampai sekarang.

Pada 1999, Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta menghukum Kapten Dadang 16 bulan penjara tanpa dipecat. Kariernya mulus, terakhir dia menyandang pangkat mayor jenderal. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan saat mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, pada 2020 dia melantik Dadang sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan (Dirjen Potan Kemenhan).

Komandan Satgas Rencong-94, Kapten Eko Margiono, juga lulusan Akmil, satu angkatan di bawah Mayor Jenderal Dadang. Eko kini berpangkat Letnan Jenderal dan menjabat sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI (Dankodiklat). Eko pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus (2018-2019) dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI (2021-2023).

Dipimpin oleh Letda Parno, Komandan Pos Tidar 01/Geumpang, penyergapan Pawang Rasyid dilakukan dengan kekuatan 12 personel Kopassus. Tiga Kopassus yang bertugas di Pos Tidar-01 Geumpang, dan sisanya adalah

Kopassus yang dipilih oleh Komandan Pos Sattis-A Tidar/ Kota Bakti, Kapten Dadang Hendrayudha. Mereka adalah Letda Parno, Sertu Jaswadi, Sertu Sarjiwo, Sertu Basudin, Serda I Nyoman N, Sertu Suhud, Serda Nandang Z, Serda Sunarso, Praka Aep Dani, Praka Risman Gunawan, Praka Hermanto, dan Pratu Mamat Rahmat.

Barang-barang yang ikut dirampas dan disita dalam penyergapan meliputi dua Alquran, empat tasbih, satu pucuk pistol Colt dan enam amunisi kaliber 32 mm, enam parang, empat pisau dapur, satu radio transitor, satu senter, empat ransel, dua karung beras, dua karung gandum, empat pisau dapur, satu jala, jaring ikan 20 meter, sepuluh potong pakaian, satu plastik kail, sepuluh rol klise, satu buku, kacang tanah, padi, ladang padi seluas 0,5 hektare dengan umur padi dua minggu, dan dua pasang sepatu karet.

Kopassus, dalam *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*, mengidentifikasi Pawang Rasyid sebagai Panglima GAM Wilayah Pidie dan Saleh Maha sebagai Panglima Muda I/ Pidie.

“GPK-AM, dalam struktur organisasinya, dibagi menjadi empat wilayah, yaitu Wilayah Pidie, Wilayah Batee Ilike, Wilayah Pasee, dan Wilayah Peurlak. Khusus Wilayah Pidie, dengan panglima wilayahnya Pawang Rasyid, merupakan daerah yang militansi GPK-nya sangat kuat. Hal ini karena pimpinan tinggi GPK-AM, Hasan Tiro, berasal dari Pidie dan panglima wilayahnya yang sangat disegani oleh masyarakat setempat maupun oleh GPK-AM berasal dari

## Cara Kopassus Menemukan, Merencanakan, dan Melancarkan Penyergapan Pawang Rasyid

**11-17 Juni 1995**

Menggunakan dan mengontakan warga sipil yang disebut panah atau Terang Pembantu Operasi untuk menemukan Pawang Rasyid di hutan.

**18 Juni 1995**

Bersama Satgas Rencong-94, Kapten Eka Marjono, memberikan petunjuk dan teknik penyergapan pada Ransellis A/Pidie, Kapten Dadang Hendrayudha.

**20 Juni 1995**

Pawang Rasyid, 73 tahun, Saleh Maha, Muhammad Mearoksa, Del Fauziah, Naorufah, 5 tahun, dan Muhammad Sabillah, 6 bulan, meninggal dunia dalam penyergapan pada 20 Juni 1995.

**18 Juni 1995**

Informasi dari panah yang diterima Dadang Tidar di Geumpang, Letda Parno, disampaikan pada Komandan Pos Sattis-A Tidar/Kota Bakti, Kapten Dadang Hendrayudha.

**18 Juni 1995**

Kopas Sattis A-Tidar/Kota Bakti, Kapten Dadang Hendrayudha, memilih 12 Kopassus.

Mereka adalah Letda Parno, Sertu Jaswadi, Sertu Sarjiwo, Sertu Basudin, Serda I Nyoman N, Sertu Suhud, Serda Nandang Z, Serda Sunarso, Praka Aep Dani, Praka Risman Gunawan, Praka Hermanto, dan Pratu Mamat Rahmat.

**18 Juni 1995**

Kopas Sattis A-Tidar/Kota Bakti, Kapten Dadang Hendrayudha, melaporkan penemuan tempat persembunyian Pawang Rasyid pada hari-2/ops Satgas Rencong-94.

**19 Juni 1995**

Tim penyergap berangkat menuju sasaran.



Eka Marjono



Dadang Hendrayudha

Salah satu anggota Tim Penyergapan Pawang Rasyid, Kapten Dadang Hendrayudha, bersama dengan anggota lainnya.

Salah satu anggota Tim Penyergapan Pawang Rasyid, Kapten Dadang Hendrayudha, bersama dengan anggota lainnya.



Kecamatan Geumpang, Pidie,” demikian dikutip dari *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh Periode November 1994 - November 1995*.

Menurut Kopassus, “Pawang Rasyid merupakan GPK-AM yang sejak pertama kali pergolakan di Aceh berkobar DI/TII tahun 1952, AM tahun 1976, dan AM 1990 merupakan tokoh kharismatik yang disegani oleh masyarakat Pidie sehingga situasi dan kondisi masyarakat Pidie sangat tertutup dalam memberikan informasi maupun keterangan yang lain tentang keberadaan Pawang Rasyid.”

Ketika helikopter yang membawa jenazah Pawang Rasyid dan kelompoknya mendarat di tanah lapang di

## Bergerilya dalam Tiga Perang (1953-1995)

- Muhammad Rasyid Meuraksa

- Panglima GAM Wilayah Pidie

- Lahir di Simpang Turue pada 1922

- Komandan Peleton DI/TII Geumpang

- Anak ketiga dari 11 bersaudara, pasangan Meuraksa dan Tri Anita

- Diburu selama lima tahun (1990-1995) dalam Operasi Jaring Merah (1990-1998)

- Akrab disapa Komandan Rasyid atau Pawang Rasyid

- Lolos dari Operasi Kanggala dan Operasi Khusus

- Pawang gajah



Anas.co

78

sebelah kantor Camat Geumpang, Jabaruddin diminta untuk memastikan jenazah anggota keluarganya.

“Saya yang memandikan jenazah ayah saya dan jenazah Pawang Rasyid di meunasah (surau) Simpang Turue, sementara jenazah Cut Fauziah dan kedua anaknya dimandikan abang Cut Fauziah, Teungku Saifullah,” kata Jabaruddin.

Mereka dimakamkan di pemakaman umum di Dusun Simpang Turue.

Jabaruddin mengatakan salah seorang TPO yang ikut dalam penyergapan Pawang Rasyid, Yanto, memberitahukannya bahwa Muhammad Sabillah, yang saat itu berumur lima bulan, masih selamat di detik-detik terakhir penyergapan tersebut. “Tapi bayi itu kemudian ditembak dari jarak dekat di bawah dagu dan peluru tembus ke kepala bagian atas,” tutur Jabaruddin.

Meski menerima informasi dari dua TPO bahwa terdapat perempuan dan anak-anak dalam kelompok Pawang Rasyid, Komandan Satgas Rencong-94, Kapten Eko Margiono, mengabaikan informasi ini. Kendati telah menewaskan satu perempuan dan dua anak-anak, Kapten Eko Margiono justru menganggap operasi penyergapan Pawang Rasyid sebagai keberhasilan, dan karena itu dia meminta kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat bagi 12 personel Kopassus yang terlibat dalam operasi ini.

Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, saat itu Komandan Kopassus, memenuhi permintaan bawahannya itu dan pada pada 5 September 1995 menandatangani surat

79



Tempat pemakaman umum di Dusun Simpang Turue, Gampong Mane, Kecamatan Mane, Pidie, terletak di sebuah bukit. Pawang Rasyid mewakafkan tanahnya itu untuk pemakaman umum tersebut.

keputusan (Skep/76-12/IX/1995) tentang kenaikan pangkat untuk delapan dari 12 personel Kopassus, yakni Serka Sarjiwo, Serka Basudin, Serka Jaswadi, Serka Suhud, Sertu Sunarso, Sertu Nandang Z, Sertu I Nyoman N, dan Praka Mamat Rahmat.

Setelah meninggalnya Pawang Rasyid, kata Jabaruddin, Kopassus tidak lagi menangkap, menyiksa, dan membunuh kerabat sang panglima. Hal itu juga ditandai dengan pengurangan jumlah personel Kopassus di Pos Sattis Tidar-01 Geumpang. Terhitung sejak Agustus 1995, Kopassus meninggalkan Pos Sattis Tidar-01 Geumpang.

Tiga tahun setelah tewasnya Pawang Rasyid, di tengah tuntutan reformasi, pada Agustus 1998, presiden BJ Habibie mencabut DOM di Aceh yang telah berlangsung selama kurang lebih satu dekade, yang secara simbolik ditandai dengan penarikan pasukan non-organik, termasuk Kopassus.

Sejak saat itu, dua TPO yang pernah bertugas di Pos Sattis di Dusun Simpang Turue, Gampong Mane, dan di kantor Camat Geumpang—Yanto dan Mizar—juga lenyap dari Simpang Turue.

Ketika GAM melakukan reorganisasi pada 1998 dan makin mendapatkan dukungan masyarakat, Jabaruddin bergabung dan ditunjuk sebagai Panglima GAM Sagoe Mane. Dua putra pasangan M Jalil Sulek dan Saudah Aleh—Hasballah M Jalil dan M Yusuf, 49 tahun — juga bergabung dalam GAM. []



82

## Penyiksaan David Yuliansyah di BNNP Aceh dan Muslihat Mengaburkan Fakta Kematianannya

Sampai saat ini, keluarga David Yuliansyah, korban penangkapan sewenang-wenang dan korban penganiayaan petugas BNNP Aceh, tidak mendapatkan surat perintah penangkapan David. Keluarga David juga tidak diberikan pakaian terakhir yang dikenakan David pada malam penangkapan. Hasil visum, rekam medis, dan hasil autopsi David diklaim sebagai informasi yang dikecualikan bahkan untuk istri David sendiri. Ini adalah cerita tentang penangkapan sewenang-wenang terhadap David, cerita tentang penganiayaan yang menyebabkan David meninggal dunia, dan cerita tentang bagaimana kasus penganiayaan tersebut direkayasa dengan melibatkan banyak pihak.

83

**R**ABU, 7 Desember 2022 pagi, Irfan Nanda Setia, 49 tahun, mendapat panggilan telepon dari salah seorang kerabat jauhnya, Aipda Rahayu Saputra. Suara di ujung telepon menebar kabar buruk. Adik Irfan, David Yuliansyah, ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.

Irfan mencecar sejumlah pertanyaan pada Aipda Rahayu terkait kronologis penangkapan, tempat penangkapan, dan keberadaan David saat itu.

“David mengalami penyiksaan yang berat,” kata Irfan, menirukan ucapan Briпка Rahayu padanya.

Semula, lewat pesan WhatsApp, Irfan menerima foto-foto David di dalam sel tahanan BNNP Aceh. Foto-foto itu menunjukkan sejumlah bekas luka di wajah David. “Dalam foto-foto itu, David mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Wajah David berdarah-darah,” ujar Irfan, Kamis, 28 September 2023.

Belakangan, setelah Irfan melaporkan kasus dugaan penganiayaan David ke Mapolda Aceh, Aipda Rahayu Saputra menarik foto-foto tersebut dari pesan WhatsApp.

Foto-foto yang diterima Irfan dari Aipda Rahayu itu adalah hasil screenshot video percakapan—video call—antara Aipda Rahayu dan Ipda Muhammad Kausar, salah seorang polisi yang bertugas di BNNP Aceh.

84



Roselita

Pada sore di hari yang sama, Irfan mengutus istrinya, Martini, untuk menyambangi rumah David yang hanya sepelemparan batu dari rumah Irfan.

Pada istri David, Roselita, 35 tahun, Martini bertanya apakah dia mengetahui bahwa suaminya itu telah ditangkap petugas BNNP Aceh. Roselita kaget mendengar hal itu. Ia menggelengkan kepala. Roselita mengatakan pada Martini bahwa David tidak pulang ke rumah semalam, dan David juga tidak mengabari tentang keberadaannya. “*Handphone* Bang David juga tidak aktif,” kata Roselita pada Martini.

Demikianlah keluarga David Yuliansyah mendapatkan kabar tentang penangkapan ayah dua anak itu.

Keesokan harinya, Kamis, 8 Desember 2022 malam, Irfan kembali mendapat panggilan telepon dari Aipda

85

Rahayu. Irfan diminta mengirimkan foto BPJS Kesehatan David. Kata Irfan, kerabatnya itu dihubungi Ipda Muhammad Kausar untuk berkomunikasi dengannya terkait kasus yang menjerat David.

“Pada Rahayu, sejak Rabu, berkali-kali saya menanyakan tentang kronologis penangkapan David, tempat David ditahan, dan kondisi David,” kata Irfan, "tapi dia tidak bisa menjawab dengan detail karena saat itu dia sedang dinas di luar kota.”

Aipda Rahayu juga menghubungi dan meminta Roselita, istri David, untuk segera mengirimkan foto kartu BPJS Kesehatan David. Roselita semula menolak untuk mengirimkan foto kartu BPJS Kesehatan suaminya itu karena dirinya berniat mengantarkan sendiri kartu tersebut sembari menjenguk David di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh yang terletak di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 23, Lamtemen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dari rumah David di Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, rumah sakit itu hanya berjarak tiga kilometer atau sekitar tujuh menit berkendara.

Tapi Aipda Rahayu, yang meneruskan pesan BNNP Aceh, melarang Roselita menjenguk David karena suaminya itu belum boleh ditemui selama 3 x 24 jam setelah penangkapan.

“Jika memang BNNP Aceh memerlukan kartu BPJS Kesehatan suami saya, mengapa mereka tidak memintanya langsung pada saya?” kata Roselita pada Aipda Rahayu.

86



Kantor BNNP Aceh di Lampeuneurut Gampong, Darul Imarah, Aceh Besar.

Roselita akhirnya mengirimkan foto BPJS Kesehatan David setelah Irfan membujuknya. Saat itu, Irfan menerima kabar dari Aipda Rahayu bahwa David dirawat karena demam biasa.

Jumat, 9 Desember 2022 pagi, Aipda Rahayu meminta Irfan untuk segera pergi ke kantor BNNP Aceh karena keadaan David sudah memburuk.

Roselita, Martini, dan adik David, Ramayuni, 37 tahun, bergegas ke kantor BNNP Aceh.

Tiba di kantor BNNP Aceh sekitar pukul 12.00 WIB, mereka mula-mula bertemu dengan Muhammad Ramadhan, seorang penjaga tahanan di kantor BNNP Aceh. Muhammad Ramadhan, yang pada hari itu mengenakan seragam safari

87

hitam, mengarahkan mereka menunggu di lobi kantor BNNP Aceh lalu mengisi buku tamu.

Roselita, Martini, dan Ramayuni kemudian diminta menunggu di musala BNNP Aceh karena waktu salat Jumat telah tiba.

Setengah jam kemudian, Ramadhan awalnya hanya mengizinkan Roselita dan adik David Yuliansyah, Ramayuni, masuk ke dalam kantor BNNP Aceh dan menemui penyidik di kantor tersebut.

Sementara, Martini berada di musala BNNP Aceh.

“Hanya ada satu petugas di ruang penyidik,” ujar Roselita, Jumat, 10 November 2023.

Petugas itu adalah Ipda Rudi Milian.

Roselita bertanya pada Ipda Rudi Milian, kapan serta di mana suaminya, David Yuliansyah, ditangkap, dan dia juga bertanya pada Ipda Rudi Milian, mengapa dirinya tidak memperoleh pemberitahuan ihwal penangkapan suaminya.

Ipda Rudi Milian menjawab, “Jadi, tahu dari mana David ditangkap?”

“Dari Bang Rahayu.”

“Ya, itu sudah cukup. Kan tidak mungkin kami beritahukan penangkapan ini ke semua orang. Sebab, bukan hanya kasus ini yang kami tangani.”

Ipda Rudi Milian kemudian mengatakan pada Roselita bahwa David dalam keadaan sakau, dan apa yang nantinya akan Roselita lihat, kata Ipda Rudi Milian, “adalah *acting* orang yang sedang sakau”.

Rahmad Saidi alias Memet, 31 tahun, yang ditangkap bersamaan dengan David, masuk ke ruang penyidik dan menjelaskan kronologis penangkapan pada Roselita.

Roselita heran, mengapa justru Rahmad Saidi yang menjelaskan kronologis penangkapan.

Roselita dan Ramayuni diizinkan untuk menemui David di salah satu ruangan yang berada di kantor BNNP Aceh, tapi mereka dilarang membawa handphone dan tidak diizinkan merekam video atau memotret David.

Ruangan itu berukuran 3 x 4 meter dan berlantaikan kerikil. Atap hanya menaungi setengah ruangan itu, sementara setengahnya lagi hanya berupa terali besi.

David, yang sudah tak berdaya, terbaring di atas matras yang apak. Tubuhnya, yang terbalut baju tahanan berwarna oranye serta kain sarung, terpapar matahari.

Tempat keluarga David menemuinya di kantor BNNP Aceh, Jumat, 9 Desember 2022.



“Mengapa suami saya mengenakan baju tahanan,” tanya Roselita, “sementara Rahmad Saidi tidak?”

Ipda Rudi Milian menjawab, “Bajunya basah.”

Ketika mendengar suara Roselita, David memekik, “Tidak tahu! Tidak tahu! Aduh, Mak! Aduh, Mak!”

Roselita merangkul David.

“Almarhum suami saya tidak mampu duduk,” ujarnya. “Dia bahkan tidak lagi mengenal saya dan anggota keluarga yang lain.”

Di sudut ruangan itu, Roselita melihat air kemasan dan sepotong kue yang masih utuh maka dia mencoba menyuapi kue tersebut ke mulut David. “Tapi suami saya sudah tidak bisa mengunyah makanan lagi. Dia hanya bisa minum air meski tidak banyak,” kata Roselita.

Tak lama kemudian, Rahmad Saidi membawa sebungkus nasi. Roselita beberapa kali mencoba menyuapi nasi ke dalam mulut suaminya, tapi David terus-terusan memuntahkannya.

Di waktu yang hampir bersamaan, Martini, yang masih berada di depan musala BNNP Aceh, berpas-pasan dengan Muhammad Ramadhan.

“Tolonglah, Dik, Kakak mau masuk ke dalam untuk melihat David,” kata Martini. “Kakak sudah sampai ke sini tapi tidak bisa berjumpa dengan David.”

“Ikut saya, Kak,” perintah Ramadhan.

Martini membuntut di belakang Ramadhan hingga akhirnya ia bisa berdiri di depan ruangan tempat David

berada. Di sana, ia sempat berbincang dengan Rahmad Saidi alias Memet terkait kronologis penangkapan semalam.

Siang itu, Memet mengenakan kaos merah dan celana jins hitam.

“Kak, semalam, Bang David dipukuli parah sekali sewaktu mencari pengedar. Bang David semula tidak mau memberikan informasi tentang pengedar sabu,” kata Rahmad Saidi pada Martini. “Sepulang dari rumah pengedar sabu Bang David berubah seperti ini.”

Rahmad Saidi alias Memet juga mengatakan pada Martini dan Ramayuni bahwa Zulmansyah alias Si Nek alias Nek Man ikut memukuli David pada malam penangkapan karena David membocorkan informasi tentang Si Nek yang melakoni profesi sebagai pengedar sabu.

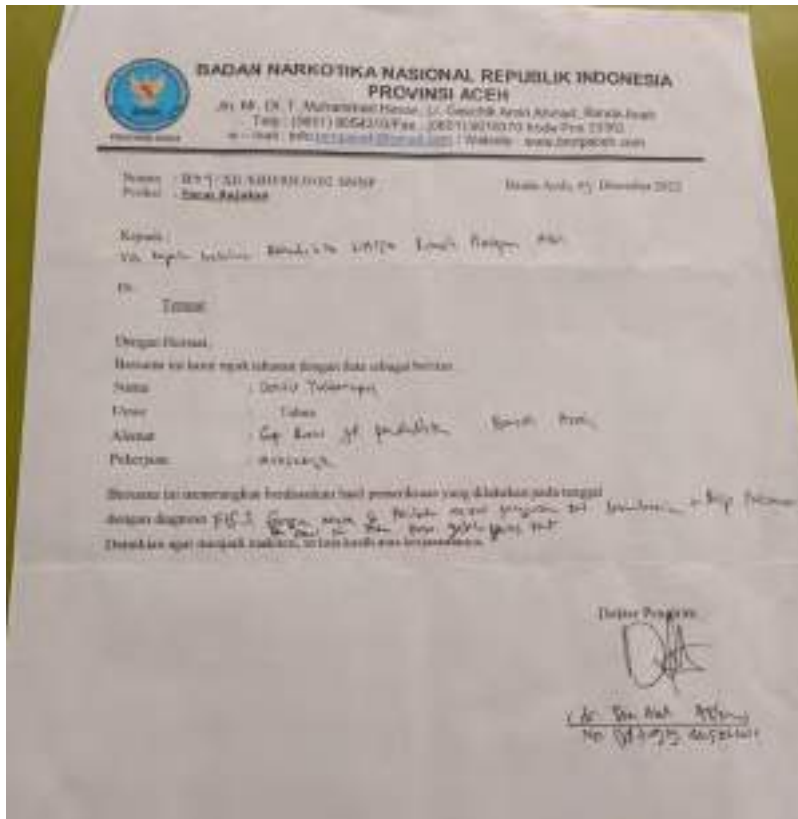
Ipda Rudi Milian menyela, “Jelaskan, Met, Bang Bulek (David) kena pasal apa saja?”

“Kurir dan pemakai,” ujar Rahmad Saidi alias Memet.

Ipda Rudi Milian berkata pada Martini bahwa Rahmad Saidi sudah sangat berpengalaman di dunia narkoba jenis sabu karena Rahmat sudah dua kali ditangkap.

“Tapi, Kak,” kata Rahmad Saidi alias Memet, “Bang Bulek (David) bisa saja bebas jika memang terbukti dia geger otak.”

David memiliki dua nama panggilan: Bang Bulek dan juragan. Panggilan terakhir ditabalkan pada David karena dia memiliki usaha air isi ulang di depan rumahnya.



dr Dian Abdi membuat surat rujukan nomor B/04/XII/KBD/RH.04.02/BNNP tanggal 5 Desember 2022 ke Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumoh Harapan Aceh (Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Aceh). Dok. keluarga.

Mendengar kata-kata Rahmad Saidi alias Memet, Ipda Rudi Milian memintanya tak lagi bicara dengan Martini, Roselita, dan Ramayuni dan segera menyingkir dari sana.

“David sedang *acting* itu, Kak,” kata Ipda Rudi Milian. “Ada CCTV kok di setiap sudut kantor ini.”

Martini kemudian melihat ke sekeliling. Dan benar. Ada banyak CCTV di kantor BNNP Aceh.

Roselita kemudian diminta menghadap dokter di BNNP Aceh, dr Dian Abdi Ashari.

“Suami Ibu dalam keadaan sakau. Kondisi suami ibu, yang Ibu lihat tadi, dikarenakan putus zat. Suami ibu juga tidak mau makan,” kata dr Dian Abdi Ashari pada Roselita. “Suami ibu sudah boleh pulang.”

“Mengapa suami saya bisa dibawa pulang, dokter?” tanya Roselita. “Kan, kondisi suami saya, kata dokter tadi, lagi sakau.”

dr Dian Abdi menjawab bahwa David boleh pulang karena “barang bukti yang ditemukan sedikit”.

Roselita bertanya pada dr Dian Abdi apa yang akan terjadi jika suaminya itu dibawa pulang, dan dia juga berkonsultasi tentang tempat yang ideal untuk merawat suaminya.

dr Dian Abdi diduga menutupi kondisi fisik David yang sebenarnya setelah David mengalami pelbagai tindakan penyiksaan. dr Dian mencoba meyakinkan Roselita bahwa suaminya itu benar-benar sedang sakau akibat putus zat, dan ketika kondisi putus zat pada David berakhir, kata dr Dian Abdi pada Roselita, David akan kembali mencari dan mengonsumsi sabu.

Roselita tak ingin membawa pulang David ke rumah dalam keadaan seperti itu. Karena itu, dr Dian Abdi membuat surat rujukan nomor B/04/XII/KBD/RH.04.02/BNNP tanggal 5 Desember 2022 ke Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumoh Harapan Aceh (Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Aceh).



“Kemudian, saya disodorkan surat yang diserahkan petugas BNNP Aceh tanpa ada penjelasan apa-apa terkait surat itu. Belum sempat saya membaca surat itu, karena sudah panik, saya buru-buru menandatangani,” sebut Roselita.

Saat Roselita sedang berbincang dengan dr Dian Abdi Ashari, adik David yang lain, Risa Aulia, 36 tahun, tiba di kantor BNNP Aceh. Saat itu sudah pukul 16.00 WIB. Di sana, mula-mula, Risa Aulia bertemu dengan Aipda Khairil Aswin. Pada Risa, Aipda Khairil Aswin memperlihatkan hasil rotgen David Yuliansyah.

“Paru-parunya sudah hitam dan kronis,” kata Aipda Aswin pada Risa Aulia.

Belum sempat Risa melihat hasil rotgen tersebut dengan seksama, Aipda Aswin cepat-cepat menyimpannya kembali di bawah meja.

Risa Aulia juga bertemu dengan Rahmad Saidi alias Memet. Pada Risa, Memet juga mengatakan bahwa David mendapat penganiayaan sepanjang pencarian rumah pengedar sabu, Zulmansyah alias Si Nek.

Karena David Yuliansyah hendak dibawa ke Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Aceh, Roselita mengganti pakaian suaminya.

Tapi sebelum hal itu dia lakukan, Roselita diarahkan untuk menemui seorang petugas di BNNP Aceh yang lainnya, yakni Bripka Mukhtaruddin. Rahmad Saidi alias Memet berdiri di sisi Bripka Mukhtaruddin.

*Handphone* David—Realme hitam—berada di tangan Bripka Mukhtaruddin. “Apa sandi HP ini?”

Roselita menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui sandi *handphone* suaminya.

“Di hadapan saya, petugas itu mencoba mengakses HP suami saya berkali-kali,” kata Roselita.

Roselita menerima *handphone* dan dompet suaminya di kantor BNNP Aceh. Kelak, dalam perjalanan pulang ke rumah dari Rumah Sakit Jiwa Aceh, Roselita singgah di kantor BNNP Aceh untuk mengambil sepeda motor David: Honda Beat hitam berles merah yang bernomor polisi BL 4232 AB.

Ketika mengganti baju David Yuliansyah, Roselita melihat biru lebam dan memar di bawah leher suaminya, goresan luka di pipi, dan luka yang menganga di dahi David.

“Tumit kaki suami saya juga biru,” ujar Roselita. “Suami saya juga mengeluhkan tulang rusuknya sakit sekali.”

Roselita bertanya pada Ipda Rudi Milian, yang masih berdiri di depan ruangan tempat David ditempatkan di kantor BNNP Aceh, mengapa ada bekas luka lebam di tubuh suaminya.

“Itu bekas bekam,” jawab Ipda Rudi Milian, menundukkan wajahnya.

Di detik-detik terakhir David berada di kantor BNNP Aceh, Roselita melihat Ipda Rudi Milian, Rahmad Saidi alias Memet, dan dr Dian Abdi, mencoba mendudukkan David, menyulut rokok, lalu menyelipkan rokok itu di bibir

David untuk menciptakan kesan bahwa David benar-benar sedang beracting dan pura-pura sakit.

**DAVID** Yuliansyah meninggalkan rumahnya di Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan sepeda motor Honda Beat hitam berles merah yang bernomor polisi BL 4232 AB, Selasa, 6 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB. Malam itu, ia mengenakan kaos abu-abu dan celana jins ponggol biru. David menerima panggilan telepon dari Rahmad Saidi alias Memet untuk segera menuju ke sebuah rumah berkelir kuning di Dusun Merak, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Jaraknya hanya lima menit berkendara.

Rumah itu adalah rumah kontrakan Iqbal, 37 tahun. Seharian-hari Iqbal bekerja sebagai pengamen. Pada Desember

Rumah di Dusun Merak, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, tempat penangkapan David Yuliansyah dkk.



2022, setahun masa kontrakan Iqbal di rumah tipe 36 itu—rumah bantuan tsunami—sebenarnya sudah berakhir. Iqbal mengontrak rumah itu Rp 7 juta setahun. Tapi karena belum ada penyewa rumah yang baru, saat-saat itu, Iqbal masih bisa menempati rumah itu. Bersama teman-temannya, — David Yuliansyah, Rahmat Riski, 27 tahun, dan Rahmad Saidi alias Memet— Iqbal beberapa kali mengonsumsi sabu di sana.

Sekitar pukul 23.50 WIB, Rahmad Saidi alias Memet meminta David Yuliansyah membeli sabu. Ia menyerahkan uang senilai Rp 100 ribu. Iqbal, sepulang dari mengamen, menambah uangnya senilai Rp 80 ribu sehingga David bisa membeli dua paket sabu.

“Sore di hari yang sama, mereka (David, Rahmat Riski, dan Rahmad Saidi alias Memet) juga menggunakan sabu di rumah saya tanpa meminta izin pada saya,” kata Iqbal, Sabtu, 28 Oktober 2023.

David menelpon Zulmansyah alias Si Nek, 38 tahun, pengedar sabu langganannya.

“Bang,” kata Si Nek. “Ini jam rawan. Jangan pergi lagi ke sini.”

Biasanya, Zulmansyah alias Si Nek tak lagi melayani pembeli sabu di atas pukul 22.00 WIB.

Tapi David tetap bersikeras untuk membeli sabu. Ia memacu sepeda motor Honda Beat ke Gampong Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, gampong tempat Zulmansyah alias Si Nek tinggal.



Rumah Zulmansyah alias Si Nek alias Si Nek Man di Gampong Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Meski David sudah menjadi langganan kepercayaannya, malam itu, Si Nek tidak menyerahkan sendiri sabu pada David, tapi ia mengutus kurirnya.

Ketika tiba di rumah Iqbal, David menyerahkan dua paket sabu yang disatukan dengan perekat pada Rahmat Riski. Rahmat kemudian membersihkan alat hisap atau bong, kaca pyrex, dan sedotan, yang mereka gunakan sore tadi, di kamar belakang. Iqbal berada di kamar depan, sedangkan David Yuliansyah berada di ruang tamu. "Melihat barang (sabu) pun belum saya, Bang," kata Iqbal.

Rahmad Saidi alias Memet keluar untuk membeli minuman kemasan dengan sepeda motor David.

Mereka akan mengonsumsi sabu sebentar lagi. Tapi, beberapa saat sebelum Rahmad Saidi alias Memet kembali ke rumah itu, sembilan anggota BNNP Aceh merangsek masuk ke dalam rumah kontrakan Iqbal. Mereka adalah Bripka Suwandi D SH, Aipda Irwandi, Bripka Andy Saputra, Bripka Muktharuddin, Bripka Ricky Frenandar, Aipda Khairil Aswin, T Farizi Mundzir, Saepul Rahman, dan Muhammad Ramadhan. Tiga nama yang disebut terakhir bukanlah anggota Polri. T Farizi Mundzir dan Saepul Rahman adalah tenaga kontrak K-9, dan Muhammad Ramadhan adalah penjaga tahanan di BNNP Aceh. Ramadhan adalah seorang PNS.

Dari kiri ke kanan: Aipda Irwandi SE (dua kiri), Bripka Muktharuddin (tiga kiri), Bripka Suwandi D SH (empat kiri), dan Saepul Rahman (lima kiri). Keempatnya merupakan anggota BNNP Aceh yang terlibat dalam penangkapan David Yuliansyah. Sumber foto: Instagram zamorano\_francisco.



100

Sebagian tiba dengan mobil Toyota Avanza berwarna silver, dan sebagian lagi tiba dengan sepeda motor.

Saat digeledah, petugas BNNP Aceh tidak menemukan sabu di saku celana Rahmat Riski.

“BB sama Memet, Bang,” Rahmat Riski berkelit.

“Di mana dia?”

“Sedang beli minuman, Bang.”

Ketika diminta melangkah ke ruang tamu, secepat kilat, Rahmat Riski menelan dua paket sabu tersebut. Beratnya sekitar 0,6 gram.

Setibanya Rahmad Saidi alias Memet dengan sepeda motor di rumah kontrakan Iqbal, ia mencoba melarikan diri.

Aipda Irwandi sempat mengacungkan pistol ke arah Rahmad Saidi alias Memet, tapi dia tidak menembak Memet yang melarikan diri.

“Saat itu, kalau saya yang melarikan diri, sudah pasti saya ditembak,” kata Rahmat Riski, Kamis, 9 November 2023.

Meski sempat melarikan diri, Rahmad Saidi alias Memet berhasil dicokok pada malam itu juga. Dia diboyong kembali ke rumah kontrakan Iqbal.

Di rumah kontrakan Iqbal, David mendapat penganiayaan yang paling parah daripada Iqbal dan Rahmat Riski. Sementara, Rahmad Saidi alias Memet sama sekali tidak disentuh petugas BNNP Aceh.

*Handphone* David Yuliansyah, Rahmat Riski, dan Iqbal, disita.

“Wajah saya bengkak karena ditampar,” kata Rahmat Riski.

101

**Petugas BNNP yang Melakukan Penangkapan terhadap David dkk pada Rabu, 7 Desember 2022**

**Bripka Andy Saputra**

**M Ramadhan  
(Penjaga Tahanan)**

**Bripka Suwandi D SH**

**T Farizi Mundzir  
(Kontrak K9)**

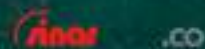
**Bripka Muktharuddin**

**Aipda Irwandi SE**

**Bripka Ricky Frenandar**

**Aipda Khairil Aswin**

**Saepul Rahman  
(Kontrak K9)**



102

Keempatnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil Avanza berwarna silver. Adalah Saepul Rahman yang memegang kemudi mobil tersebut.

Di dalam mobil, David mengalami penganiayaan yang cukup berat karena awalnya dia menolak memberitahukan letak rumah Zulmansyah alias Si Nek di Gampong Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Belakangan, setelah menunjukkan rumah Zulmansyah alias Si Nek, David masih dianiaya di dalam rumah Zulmansyah. Bahkan sesampainya di kantor BNNP Aceh, David menerima penganiayaan yang lebih parah.

Seorang saksi mata yang melihat penggrebekan rumah Zulmansyah alias Si Nek menceritakan pintu rumah Zulmansyah ditendang hingga terbuka, Rabu, 7 Desember 2022, sekitar pukul 01.20 WIB.

“Ada petugas BNNP Aceh yang datang dengan sepeda motor dan mengenakan baju ojol (ojek online),” kata saksi mata tersebut.

Kata saksi mata yang sama, petugas BNNP Aceh melepaskan satu tembakan ke tanah.

“Tadi, kata kalian, kalau saya menunjukkan rumah Si Nek, kalian tidak memukuli saya lagi,” kata David pada petugas BNNP Aceh.

Mendengar kata-kata itu, petugas BNNP Aceh menghujuni pukulan ke tubuh David.

Zulmansyah alias Si Nek tak berlutut saat ditangkap. Tatkala ditanyai petugas BNNP Aceh apakah dia menjual

103

sabu pada David tadi, ia mengiyakan sehingga David kembali dihujani pukulan.

Petugas BNNP Aceh menggeledah rumah Zulmansyah alias Si Nek. Beberapa paket sabu—paket Rp 100 ribu dan paket Rp 200 ribu—ditemukan di dalam kaleng rokok Gudang Garam Merah di bawah kolong tempat tidur.

Si Nek kemudian menuntun petugas BNNP Aceh ke halaman belakang rumahnya. Di sana, ia menggali tanah untuk mengambil satu kaleng rokok Gudang Garam Merah lainnya yang berisikan beberapa paket sabu: paket sabu Rp 100 ribu dan paket sabu Rp 200 ribu.

Zulmansyah alias Si Nek tinggal di rumah yang terletak di tepi jalan seorang diri. Dia belum menikah.

Kata sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co), Si Nek menggadaikan rumahnya senilai Rp 15 juta. Uang Rp 15 juta tersebut diduga ia gunakan untuk menyuap petugas BNNP Aceh agar dia tidak ditahan. “Sudah empat kali dia (Zulmansyah alias Si Nek) ditangkap, tapi dia selalu bisa bebas dengan uang tebusan,” kata sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) yang identitasnya tak ingin dipublikasikan. “Yang menempati rumah Si Nek sekarang bukan warga Gampong Lamtutui.”

Senin, 4 Desember 2023, [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) memastikan apakah benar rumah tipe 36, yang juga rumah bantuan tsunami, di Gampong Lamtutui adalah rumah Zulmansyah.

Seorang perempuan paruh baya, yang berada di rumah tersebut, membenarkan hal itu. Ia mengatakan rumah itu sudah empat bulan ia sewa seharga Rp 4 juta per tahun pada kakak Zulmansyah.

[sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) mencoba melakukan konfirmasi pada Zulmansyah alias Si Nek. Tapi dia disebut-sebut tak lagi berada di Gampong Lamtutui dalam beberapa bulan belakangan.

Sesampainya di kantor BNNP Aceh di Gampong Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, David Yuliansyah, Zulmansyah alias Si Nek, Iqbal, Rahmat Riski, dan Rahmad Saidi alias Memet, berada di sel tahanan yang sama. Hanya saja, berbeda dengan yang lain, Rahmad Saidi alias Memet bisa keluar-masuk sel tahanan.



“Nek,” kata David, “maaf, ya, saya terpaksa menyebut namamu karena saya sudah tak tahan lagi dipukul.”

Zulmansyah alias Si Nek sudah sangat iba melihat kondisi David. “Biasa, Bang. Ini risiko dalam menjalani pekerjaan yang melawan hukum.”

Rahmat Riski mengenang, setiba di kantor BNNP Aceh pada malam itu, “Bang David masih bisa bicara”.

Di kantor BNNP Aceh, petugas BNNP Aceh menganiaya David secara bergantian. “Memet (Rahmad Saidi) juga ikut memukuli Bang David atas permintaan petugas BNN,” kata sumber sinarpidie.co yang identitasnya enggan dituliskan. “Bripka Ricky Frenandar yang menganiaya Bang David paling parah.”

Bripka Ricky Frenandar (paling kanan), Ipda Rudi Milian (kemeja coklat), Bripka Andy Saputra (mengenakan topi loreng). Sumber foto: Instagram zamorano\_francisco.



106

Selain David, Iqbal, Rahmat Riski, dan Rahmad Saidi adalah warga Gampong Lamteumen Timur.

Kata Iqbal, adalah Rahmat Riski yang mengenalkan Rahmad Saidi alias Memet pada dirinya dan David Yuliansyah. “Bang David baru mengenal Memet satu minggu,” kata Iqbal. “Kami memang sudah sering mendengar bahwa Memet (Rahmad Saidi) adalah cepu BNN. Tapi, berdasarkan pengalaman empat kali mengonsumsi sabu bersama Memet, kami tidak dikibus.”

Zulmansyah alias Si Nek diduga hanya berada di sel tahanan BNNP Aceh selama beberapa jam. Rabu, 7 Desember 2022 sore, diduga dia dibebaskan dengan tebusan Rp 15 juta.

**RABU**, 7 Desember 2022 pagi. Keadaan Rahmat Riski yang sudah buruk menjadi semakin buruk lagi saat dia bertemu dr Dian Abdi Ashari di kantor BNNP Aceh.

“Pagi di hari penangkapan, kami, kecuali Memet, tidak diberikan nasi,” kata Rahmat Riski. “Pagi itu, kalau saya tidak salah, kami hanya diberikan teh dan kue.”

Dalam kondisi kurang tidur dan belum sarapan, Rahmat Riski mendengar celaan dr Dian Abdi Ashari padanya.

“Dia (Rahmat Riski) penipu dan penjahat. Jangan sampai dia membuang BB. Awasi dia baik-baik,” kata Rahmat Riski, menirukan ucapan dr Dian pada para polisi yang semalam menangkapnya.

107

Karena itu, Rahmat dipakaikan pampers dan diawasi dengan begitu ketat.

Sementara, Rahmad Saidi alias Memet bisa pulang ke rumah untuk mengambil pakaian.

Rabu siang, Rahmat Riski dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk dirontgen. Tapi, hasil rotgen, kata Rahmat, tidak menunjukkan adanya dua paket sabu di dalam perutnya.

Rahmat Riski kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin Banda Aceh. “Satu malam saya di rumah sakit dr Zainoel Abidin,” ujar Rahmat Riski lagi, “juga tidak nampak BB sabu di dalam perut saya.”

Petugas BNNP Aceh mendesaknya agar dia bersedia dioperasi sehingga sabu di dalam perutnya bisa diambil. Tapi Rahmat Riski menolaknya.

“Malam di rumah sakit dr Zainoel Abidin baru saya diberi nasi,” ujar Rahmat Riski.

Keesokan harinya, Kamis, 8 Desember 2022 menjelang magrib, Rahmat Riski kembali digelandang ke kantor BNNP Aceh.

Malam ketika Rahmat Riski kembali meringkuk di balik jeruji besi di kantor BNNP Aceh, David Yuliansyah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh dengan ambulans BNNP Aceh. Rahmad Saidi alias Memet dan dr Dian Abdi ikut mendampingi David di rumah sakit itu.

Di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, David ditangani dr Hendri Saputra, dokter umum. Proses rotgen



David ditangani Nur Izzah, dan hasil rotgennya dibaca dr Afdhallurrahman Sp Rad— dokter spesialis radiologi. Hasil rotgen itulah yang sempat Aipda Khairil Aswin perlihatkan pada Risa Aulia di kantor BNNP Aceh.

Dan pada malam saat David dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara itulah, Ipda Muhammad Kausar menghubungi Aipda Rahayu agar Aipda Rahayu meminta foto kartu BPJS Kesehatan David Yuliansyah pada Irfan Nanda Setia dan Roselita.

Keesokan harinya, Jumat, 9 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, diduga karena sudah mengetahui bahwa David akan menemui ajal, dia dipulangkan dari Rumah Sakit Bhayangkara ke kantor BNNP Aceh untuk selanjutnya diserahkan pada keluarga.

**SEMULA**, petugas BNNP Aceh menolak membawa David ke Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan ambulans yang parkir di kantor itu. “Mereka (petugas BNNP Aceh) meminta keluarga membawa Bang David dengan mobil keluarga,” kata Risa Aulia, Sabtu, 3 Desember 2023.

Karena kondisi David saat itu tidak bisa duduk, keluarga bersikukuh meminta petugas BNNP Aceh membawa David Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan ambulans BNNP Aceh.

David akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan ambulans BNNP Aceh. Ada tiga petugas BNNP Aceh yang berada di dalam ambulans itu. “Bripka Andy Saputra duduk di samping pria yang mengemudi ambulans,”

kata istri David Yuliansyah, Roselita, yang ikut mendampingi David di dalam ambulans tersebut. “Di dalam ambulans, almarhum suami saya masih berkata: Aduh Mak. Tidak tahu. Secara berulang-ulang. Dia juga mengeluhkan tulang rusuknya sakit sekali.”

Di IGD Rumah sakit Jiwa Aceh, David diketahui mengalami demam yang tinggi.

Seorang tenaga kesehatan di IGD Rumah Sakit Jiwa Aceh menelpon dr Syahrial SpKJ, dokter spesialis kejiwaan, dan memberitahukannya bahwa David menderita demam yang tinggi dan kejang-kejang. Tenaga kesehatan tersebut bertanya pada dr Syahrial apakah tidak sebaiknya David dirawat terlebih dahulu. Tapi lewat telepon, dr Syahrial meminta tenaga kesehatan tersebut tetap membawa David ke ruang detoksifikasi NAPZA.

“Saat hendak melakukan tes urine, Bang David tak bisa lagi mengeluarkan urine,” kata Roselita.

Di ruang detoksifikasi NAPZA, tak ada anggota keluarga David yang diizinkan menemaninya. David menghabiskan satu malam di ruang itu.

Keesokan harinya, Sabtu, 10 Desember 2022 pagi, dari ruang detoksifikasi NAPZA, David dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Jiwa Aceh karena kondisinya semakin memburuk.

Setelah memeriksa keadaan David, dokter umum di IGD Rumah Sakit Jiwa Aceh, dr Dessy Maulizar, berkonsultasi dengan dr Said Aandy Sp PD, dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit yang sama. dr Dessy Maulizar juga

berkonsultasi dengan dr Syahril SpKJ, dokter yang semalam meminta David untuk tetap dibawa ke ruang detoksifikasi NAPZA meski David menderita demam yang tinggi dan kejang-kejang.

Di tempat yang berbeda, Irfan Nanda Setia menerima panggilan telepon dari Aipda Rahayu. Irfan diminta segera ke Rumah Sakit Jiwa Aceh karena David sudah sekarat.

Berdasarkan instruksi dr Said Aandy Sp PD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Jiwa Aceh, pihak Rumah Sakit Jiwa Aceh memutuskan merujuk David ke RSUD dr Zainoel Abidin yang terletak tepat di depan rumah sakit itu, tapi takdir berkata lain. David meninggal dunia di Rumah Sakit Jiwa Aceh.

David tiba di RSUD dr Zainoel Abidin saat ia tak lagi bernyawa untuk divisum.

Tenaga kesehatan di ruang jenazah RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh meminta keluarga melaporkan kasus dugaan penganiayaan ini ke kantor polisi terlebih dahulu sebelum David divisum.

“Tanpa surat dari Polda Aceh, dokter di rumah sakit Zainoel Abidin tidak mau melakukan visum,” kata Risa Aulia.

Irfan masih dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Jiwa Aceh saat dia menerima kabar David telah meninggal dunia. Risa lalu meminta Irfan untuk segera melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan David meninggal dunia ke Polda Aceh. Maka, pada hari yang sama,

Irfan Nanda Setia melaporkan kasus yang menimpa David ke Polda Aceh.

Tak lama kemudian, dokter forensik di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh, DR dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE, menghardik para tenaga kesehatan di ruang jenazah. “Bagaimana saya melakukan visum kalau surat dari Polda belum ada?”

“Dok, tolonglah dibantu,” Risa Aulia memohon. “Di gampong, jenazah Abang saya sudah ditunggu untuk difardu-kifayah.”

Irfan Nanda Setia kembali ke RSUD dr Zainoel Abidin dengan tanda terima laporan polisi. dr Taufik menertawakannya karena surat yang dimaksud dr Taufik adalah surat permintaan untuk melakukan visum dari penyidik Polda Aceh—bukan tanda terima laporan polisi.

“Saat almarhum adik saya masih di ruang jenazah, saya sudah ke Polda Aceh. Tujuan saya bergegas ke Polda Aceh agar polisi segera merespon kasus David dengan menemani atau mendampingi dokter saat proses visum. Tapi yang terjadi tidak demikian. Saya harus dua kali bolak-balik ke Polda Aceh saat itu. Semula, kata polisi di SPKT Polda Aceh, tanda terima laporan polisi sudah cukup untuk kebutuhan visum,” kata Irfan.

Pada awalnya dr Taufik tetap berpegang pada pendiriannya: tanpa surat dari Polda Aceh, jenazah David tidak bisa divisum. Tapi Risa Aulia memohon sekali lagi hingga akhirnya dr Taufik bersedia memvisum David yang telah terbujur kaku di ruang jenazah.



dr Taufik memerintahkan para tenaga kesehatan, yang berdiri di sisinya, untuk memotret setiap bagian tubuh David yang telah dia periksa. Risa Aulia melakukan apa yang dilakukan para tenaga kesehatan itu. Ia ikut memotret bagian-bagian tubuh David yang telah diperiksa dr Taufik. Dok. keluarga.

L4

“Ini mau langsung diautopsi atau hanya divisum?” tanya dr Taufik pada Risa Aulia.

Saat itu, Risa Aulia tidak mengetahui perbedaan antara visum dan autopsi. Maka dia bertanya tentang perbedaan keduanya pada dr Taufik. dr Taufik kemudian menjelaskan perbedaan keduanya.

“Visum saja dulu, dok,” kata Risa Aulia. “Nanti, kalau memang autopsi dibutuhkan, kita autopsi.”

Saat jenazah David hendak divisum, dr Taufik bertanya pada Risa Aulia di bagian tubuh David yang mana dia kira-kira mendapat penyiksaan.

“Di dada, dok.”

dr Taufik kemudian membuka pakaian David. Ia agak terperanjat sembari berkata, “Lho, kok banyak ini biru-birunya.”

dr Taufik memerintahkan para tenaga kesehatan menggantung pakaian David. dr Taufik juga memerintahkan para tenaga kesehatan, yang berdiri di sisinya, untuk memotret setiap bagian tubuh David yang telah dia periksa. Risa Aulia melakukan apa yang dilakukan para tenaga kesehatan itu. Ia ikut memotret bagian-bagian tubuh David yang telah diperiksa dr Taufik.

Ketika memeriksa dada jenazah David, dr Taufik meletakkan kedua tangannya di dada David sembari berkata pada para tenaga kesehatan, “Dadanya tidak simetris. Kelihatan, kan?”

Para tenaga medis memerhatikan dada David dengan seksama lalu mengangguk.

115

“dr Taufik juga memeriksa lebam di kaki Bang David dengan serius,” kata Risa Aulia.

Setelah visum selesai, dr Taufik mengatakan pada Risa Aulia bahwa jenazah David sudah boleh dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan.

“Bagaimana dengan hasil visumnya, dok?”

“Untuk hasilnya, kami harus menunggu surat dari tim penyidik Polda Aceh. Hasil visum ini juga tidak bisa kami serahkan pada keluarga karena hanya penyidik Polda Aceh yang bisa mengambil hasil visum ini,” kata dr Taufik.

sinarpidie.co menanyakan tentang proses visum David, yang dilakukan dr Taufik, Sabtu, 10 Desember 2022, di RSUD dr Zainoel Abidin, padanya. “Benar, pada pemeriksaan, dada almarhum tidak simetris,” kata DR dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE, Kamis, 7 Desember 2023.

sinarpidie.co juga bertanya mengapa visum et refertum no Ver: 36/SK-09/KFM/II/2023 ia tandatangani pada tanggal 13 Februari 2023.

Apakah visum tersebut bagian dari visum pada 10 Desember atau bagian dari autopsi dan ekshumasi David pada 4 Januari 2023?

“Yang Februari adalah hasil autopsi pada 4 Januari,” jawab DR dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE singkat.

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/322/XII/2022/SPKT/POLDA Aceh 10 Desember 2022, Irfan menyebutkan bahwa informasi tentang penganiayaan David selama dia ditahan secara sewenang-wenang oleh petugas BNNP Aceh Irfan peroleh dari Rahmad Saidi alias Memet. Irfan

menerangkan dalam laporan tersebut bahwa David ditangkap bersama Iqbal, Rahmat Riski, Rahmad Saidi, dan Zulmansyah alias Si Nek alias Nek Man. Namun nama yang disebut terakhir kelak lenyap dalam gelar perkara.

Pada polisi yang mengambil keterangannya di Polda Aceh, Irfan bertanya, apakah autopsi dibutuhkan agar kasus penganiayaan David bisa terang benderang. Polisi itu mengatakan bahwa foto-foto bekas penyiksaan David sudah memadai dan menjadi bukti-bukti yang kuat bahwa David benar-benar mengalami penyiksaan.

Karena itu, Irfan meminta pemeriksaannya dilanjutkan pada Sabtu, 10 Desember 2022 malam karena ia harus menyerahkan surat permintaan untuk melakukan visum dari penyidik Polda Aceh pada dr Taufik dan membawa pulang jenazah David untuk dimakamkan.

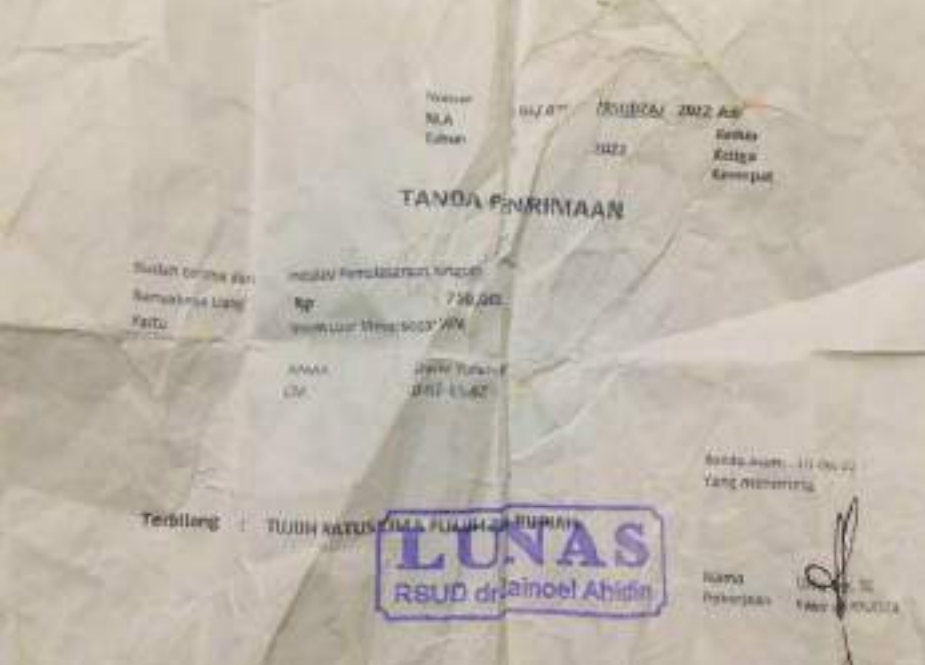
Irfan kembali ke RSUD dr Zainoel Abidin dengan membawa surat permintaan untuk melakukan visum dari penyidik Polda Aceh.

“Tapi proses visumnya sudah selesai,” kata Irfan Nanda Setia.

Ia membayar biaya visum Rp 750 ribu. “Tak ada penyidik dari Polda Aceh yang ikut hadir saat jenazah David divisum,” kata Irfan Nanda Setia.

David dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Gampong Baro.

“Setelah David dimakamkan, saya kembali lagi ke Polda. Pemeriksaan saya pada malam itu berlangsung sampai pukul 12 malam,” kata Irfan Nanda Setia.



Kuitansi biaya visum pada 10 Desember 2022. Dok. keluarga.

**KOMPOL** Raja Gunawan, Kasubdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Aceh, Iptu Iwan Wahyudi (Panit 1 Unit 3 Subdit 1 Ditreskrim Polda Aceh), dan lima penyidik pembantu pada Ditreskrim Polda Aceh, menyambangi rumah duka, Minggu, 11 Desember 2022 pagi.

“Kita lanjutkan BAP di sini biar cepat selesai,” kata Iptu Iwan Wahyudi pada Irfan Nanda Setia. “Kami menginginkan kasus ini cepat terungkap.”

Irfan, yang saat itu tidak menaruh curiga pada tindak-tanduk Iptu Iwan Wahyudi, melayani permintaan para polisi tersebut.

Saat proses BAP masih berlangsung, Iptu Iwan mencolek Irfan sambil berkata, “Bang, kita kemarin kan tidak autopsy.

Nanti abang buat surat keluarga atau istri korban tidak mau autopsy, ya. Tapi jangan bilang-bilang kami yang suruh atau kami yang buat. Buka saja di Google, ada contoh-contoh suratnya.”

“Kenapa seperti itu?” tanya Irfan. “Kadang, memang nanti perlu autopsy.”

Iptu Iwan mengatakan penganiayaan yang dialami David sudah sangat jelas sehingga autopsy tidak diperlukan lagi. “Hasil visum sudah cukup,” kata Iptu Iwan.

Maka, pada hari itu juga istri David Yuliansyah, Roselita, menulis dengan tulisan tangan surat yang dimaksud Iptu Iwan dengan didampingi Iptu Iwan, dan Roselita akhirnya menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Autopsi. Hal itu Roselita lakukan karena dia terbuai dengan kata-kata Iptu Iwan Setiawan: surat tersebut dibutuhkan untuk memperlancar proses penyelidikan kasus ini.

Masih di hari yang sama, Minggu, 11 Desember 2022 sore, dua petugas dari Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Aceh berkunjung ke rumah duka.

Pada Risa Aulia, Firdaus, petugas NAPZA, mengatakan bahwa malam ketika David berada di ruang NAPZA, ia tidak sedang sakau, tapi seperti pasien yang menderita gejer otak.

“Apabila ada pihak yang ingin menyalahkan NAPZA, kami siap membuka CCTV di NAPZA yang menunjukkan bahwa saat David dibawa ke NAPZA, kondisinya memang sudah kritis,” kata Firdaus pada Risa Aulia.

## Gara BNNP Aceh Cuci Tangan



Keuchik Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Darwis Ilyas, 60 tahun, menerima panggilan telepon dari Kombes Mirwazi, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penindakan pada BNNP Aceh.

Kombes Mirwazi mengajak Darwis berjumpa di salah satu kedai kopi di Gampong Baro. Kombes Mirwazi meminta Darwis menyampaikan keinginan pihak BNNP Aceh yang ingin melayat ke rumah duka.

“Saya ingin berjumpa dengan Irfan dan keluarga untuk bersilaturahmi,” kata Kombes Mirwazi pada Darwis.

“Baik,” jawab Keuchik Darwis, “saya sampaikan pada keluarga terlebih dahulu.”

Pada malam ketiga David meninggal dunia, Keuchik Darwis Ilyas bertemu dengan Irfan Nanda Setia dan menyampaikan pesan Kombes Mirwazi.

“Pak Keuchik,” kata Irfan Nanda Setia, “setelah adik saya diinjak-injak dan dibunuh, mereka mau samadiyah ke sini, apa itu masuk akal? Jadi, jangan bahas itu. Suruh dia berdoa untuk polisi-polisi yang membunuh adik saya saja!”

Keuchik Darwis kemudian menyampaikan penolakan Irfan Nanda Setia menerima layatan pihak BNNP Aceh ke rumah duka pada Kombes Mirwazi.

“Saya menyampaikan penolakan Irfan menerima mereka (BNNP Aceh) lewat telepon dengan bahasa yang lebih halus daripada bahasa penolakan Irfan,” kata Darwis pada [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co), Senin, 4 Desember 2023.

Kini, Kombes Mirwazi telah pensiun.

Menjelang hari ketujuh David meninggal dunia, Ipda Muhammad Kausar menawarkan uang senilai Rp 3 juta untuk membeli kambing kenduri tujuh. Tapi Irfan menolaknya.

Pada hari ketujuh David meninggal dunia, giliran dua polisi, yang memperkenalkan diri mereka sebagai anggota Propam Polda Aceh, menyambangi rumah David. Mereka adalah Ipda Yuliadi dan Aipda Adi Ari Jana. Mereka ingin melakukan pemeriksaan.



Risa Aulia (kiri) dan Irfan Nanda Setia (kanan) di depan kuburan David Yuliansyah.

“BAP kan sudah selesai kemarin. Mengapa BAP terus? Kan kalian bisa ambil BAP kemarin di Ditreskrimum,” kata Irfan.

Aipda Adi Ari Jana mengatakan bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan berbeda dengan pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Aceh.

Di tengah proses pengambilan keterangan, Aipda Adi Ari Jana berkata, “Walau bagaimana pun adik Abang kan memakai narkoba.”

“Ya, adik saya memakai,” kata Irfan. “Tapi, apakah Anda terima jika adik Anda, seorang pemakai sabu, diinjak-injak hingga mati seperti binatang diinjak-injak?”

“Tidak,” jawab Aipda Adi Ari Jana.

Irfan mengarahkan jari telunjuk ke kepalanya. “Pakai ini waktu bicara.”

Suasana kembali mencair dan pengambilan keterangan dilanjutkan hingga selesai pada hari itu.

**SELEPAS** kenduri tujuh David, Irfan Nanda Setia dan Risa Aulia berkunjung ke kantor YLBHI-LBH Banda Aceh.

Setelah didampingi LBH Banda Aceh, pada Jumat, 16 Desember 2022, istri David Yuliansyah, Roselita, mengajukan surat permohonan ekshumasi dan autopsi kepada penyidik.

“Surat permohonan itu dilampiri dengan Surat Pernyataan Pencabutan Penolakan Autopsi dari istri (alm) David Yuliansyah karena sebelumnya ia telah membuat Surat Pernyataan Penolakan Autopsi berdasarkan permintaan penyidik. Permohonan Ekshumasi dan Autopsi serta Surat Kuasa Khusus Nomor: 150/SK/LBH-BNA/XII/2022 pada hari itu juga. Permohonan ekshumasi diterima tanggal 18 Desember 2022,” kata Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat Husni Putra, Kamis, 7 Desember 2023.

Kata Muhammad Qodrat lagi, penyidik baru menanggapi permohonan ekshumasi dan autopsi dari pihak keluarga pada 22 Desember 2022, dengan meminta istri David Yuliansyah, Roselita, membuat Surat Pernyataan Bersedia Autopsi.

“Padahal sebelumnya pihak keluarga telah mengirimkan surat permohonan ekshumasi dan autopsi disertai Surat Pernyataan Pencabutan Penolakan Autopsi. Istri David



Rabu, 4 Januari 2023, penyidik melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah almarhum David Yuliansyah. Ekshumasi dan autopsi tersebut dipimpin DR dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE. Dok. keluarga.

Yuliansyah kemudian menyanggupi permintaan penyidik dengan membuat Surat Pernyataan Bersedia Autopsi tertanggal 22 Desember 2022,” ujar Muhammad Qodrat.

Sebelum ekshumasi dan autopsi terhadap David dilakukan, Irfan lagi-lagi menerima panggilan telepon dari Iptu Iwan Setiawan. “Bang besok bawa istri almarhum dan pengacara dari LBH, ya, ke Polda Aceh. Dipanggil sama Dirreskrimum,” kata Iptu Iwan Setiawan.

Senin, 26 Desember 2022, Irfan Nanda Setia, Roselita, Ramayuni, dan pengacara LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat, hadir ke Mapolda Aceh meski tanpa surat atau undangan tertulis.

“Sesampainya di Polda Aceh, kami tidak bertemu dengan Dirreskrimum, Kombes Ade Harianto, karena yang bersangkutan katanya sedang melayat ke tempat orang meninggal,” kata Irfan Nanda Setia. “Mereka (Polda Aceh) ingin mendengar langsung permintaan autopsi dari mulut istri almarhum. Mereka ingin memastikan bahwa bukan saya yang ngotot untuk ekshumasi dan autopsi.”

Pertemuan itu berlangsung di ruang Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Aceh, AKBP Syukri.

Kata Irfan, AKBP Syukri meminta dia dan istri David Yuliansyah, Roselita, memikirkan ulang dan mempertimbangkan ulang keputusan mereka melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap David.

“Dalam Islam, apalagi di Aceh, kan tidak boleh autopsi-autopsi orang yang sudah meninggal,” kata Irfan Nanda Setia, menirukan ucapan Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Aceh, AKBP Syukri, padanya dan istri David Yuliansyah, Roselita.

Irfan menegaskan bahwa dirinya menginginkan David diautopsi karena penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan adiknya itu meninggal dunia tidak berjalan.

“Kan saya sudah bilang mau autopsi. Mengapa diperlambat terus?” kata Roselita.

Berhari-hari tidak mendapatkan kabar kapan jenazah David diekshumasi dan diautopsi, Irfan Nanda Setia menelpon Iptu Iwan.

“Bang, kenapa lama kali autopsi? Seharusnya kan bisa cepat.”

“Kan prosesnya lama, Bang. Kita harus ajukan dulu ke dokter dan menunggu kapan dokternya siap,” jawab Iptu Iwan Setiawan.

“Sewaktu Abang meminta saya dan istri almarhum membuat surat penolakan autopsi kami membuatnya tak sampai satu jam.”

“Abang jangan bicara seperti itu. Seolah-olah saya yang menyuruh istri almarhum membuat surat penolakan autopsi.”

“Kan memang Abang yang meminta hal itu saat itu.”

Iptu Iwan Setiawan adalah mantan Kapolsek Bendahara, Aceh Tamiang.

Selasa, 23 Oktober 2018 lalu, ratusan massa dari Gampong Tanjung Keuramat, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang, membakar Mapolsek Bendahara, Aceh Tamiang, karena seorang tahanan narkoba, Mahyar, meninggal dunia karena diduga mengalami penyiksaan di Mapolsek tersebut. Saat itu, Iptu Iwan, yang masih berpangkat Ipda, menjabat sebagai Kapolsek Bendahara.

Di hari yang sama, mantan Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, mencopot Iwan sebagai Kapolsek Bendahara. Kala itu, posisinya digantikan oleh AKP Sumasdiono.

Namun, kasus itu menguap dan belum terungkap sampai saat ini. Karir Iwan Setiawan justru semakin moncer. Setelah didapuk sebagai Panit 1 Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimum Polda

Aceh, Iwan kini menjabat sebagai Kapolsek Sungai Mas Polres Aceh Barat.

sinarpidie.co mengirimkan sejumlah pertanyaan terkait perannya sebagai penyidik dalam mengaburkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan David Yuliansyah meninggal dunia, tapi Iptu Iwan Setiawan belum menjawabnya. Ia juga tidak menjawab panggilan telepon sinarpidie.co.

Rabu, 4 Januari 2023, penyidik melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah almarhum David Yuliansyah. Ekshumasi dan autopsi tersebut dipimpin DR dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE.

“Apabila dihitung sejak permohonan ekshumasi dan autopsi pertama kalinya pada tanggal 16 Desember 2022, proses ekshumasi dan autopsi baru dilakukan 19 hari sejak permohonan diajukan. Hal ini jelas menunjukkan lambatnya kinerja penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus. Hasil autopsi juga baru diketahui setelah lebih dari satu bulan sejak autopsi dilakukan,” kata Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat Husni Putra.

**DI** aula Ditreskrimum Polda Aceh, Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, sebelum gelar perkara terhadap laporan dugaan penganiayaan yang menyebabkan David Yuliansyah meninggal dunia dimulai, Irfan Nanda Setia melihat Iptu Iwan Wahyudi duduk di salah satu sudut di ruangan itu. Kala itu, Iptu Iwan sedang berbicara dengan

Aipda Irwandi SE dan Aipda Khairil Aswin, dua polisi yang ikut serta dalam penangkapan David Yuliansyah pada Rabu, 7 Desember 2022 dini hari.

“Dia (Iptu Iwan) seperti sedang membriefing dua anggota BNN tersebut sekitar 15 menit,” kata Irfan Nanda Setia.

Sekitar pukul 10.00 WIB, seorang polisi mempersilakan peserta gelar perkara memasuki aula Ditreskrimum.

Dari pelapor, hanya Irfan Nanda Setia, Roselita, dan Muhammad Qodrat yang diizinkan masuk ke dalam ruangan itu. Sementara, Martini dan Ramayuni tidak diizinkan mengikuti gelar perkara tersebut.

“Istri saya dan adik saya melihat kondisi David sebelum dia keluar dari kantor BNN, tapi mengapa mereka tidak boleh masuk ke dalam ruangan ini? Dan mengapa justru dua anggota BNN yang terlibat kasus ini kok ada di dalam?” kata Irfan Nanda Setia pada polisi tersebut.

Polisi itu menjawab dia hanya menjalankan perintah atasannya.

19 orang duduk mengitari sebuah meja di dalam ruang itu. Dr dr Taufik Suryadi Sp F(K) Dipl-BE, dokter forensik di RSUD dr Zainoel Abidin, dan dr Said Aandy Sp PD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Jiwa Aceh, ikut hadir.

Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Aceh, AKBP Syukri SH, memimpin gelar perkara itu.

Mula-mula, peserta gelar perkara mendapatkan masing-masing satu salinan pemaparan kasus yang disusun penyidik (salinan power point).

Usai penyidik memaparkan hasil penyelidikan, Muhammad Qodrat, Irfan Nanda Setia, dan Roselita diberikan kesempatan untuk menanggapi paparan tersebut.

Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat Husni Putra, mempertanyakan kehadiran Aipda Irwandi SE dan Aipda Khairil Aswin— dua polisi yang bertugas di BNNP Aceh dan terlibat dalam penangkapan David—dalam gelar perkara tersebut.

Muhammad Qodrat juga mengatakan bahwa dalam gelar perkara itu, penyidik seperti pengacara yang sedang membaca pledoi untuk BNNP Aceh.

“Paparasi penyidik mengarah pada tidak adanya tindak pidana dan tidak adanya keterlibatan BNNP Aceh dalam penganiayaan David hingga dia meninggal dunia,” kata Muhammad Qodrat pada [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Irfan tersulut emosi usai ia mendengarkan paparan-paparan yang menurutnya tidak masuk akal, termasuk hilangnya nama salah seorang pelapor, yakni Zulmansyah alias Si Nek alias Nek Man.

“Hasil BAP Rahmad Saidi yang mereka tonjolkan,” kata Irfan.

Roselita mengkritik pemaparan tentang hasil autopsi. “Almarhum suami saya dinyatakan meninggal dunia karena penyakit yang diderita maka saya bertanya apa penyakit yang diderita suami saya.”

“Lambung akut,” jawab penyidik.

“Selama saya menikah, suami saya belum pernah mengalami sakit lambung dan belum pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit lambung,” kata Roselita.

Bekas-bekas luka lebam di tubuh David Yuliansyah, oleh penyidik, diklaim karena David membenturkan diri ke dinding dan menjatuhkan diri di kamar mandi.

“Kalau ini hasil gelar perkara dan ini hasil visum,” kata Roselita, "ditertawakan anak SMA.”

Di dalam gelar perkara tersebut, penyidik juga memaparkan hasil kesimpulan ahli forensik: dari hasil pemeriksaan luar, dalam, dan pemeriksaan penunjang, kematian David Yuliansyah adalah proses penyakit yang diderita David selama hidupnya. Bukan karena kekerasan benda tumpul ataupun gejala keracunan.

Kamis, 7 Desember 2023, [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) bertanya pada Dr dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE, dokter forensik pada RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh, apa penyakit yang diderita David selama hidupnya.

“Yang mengetahui penyakit yang dialami pasien adalah dokter yang merawat,” kata Dr dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE.

[sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) kemudian bertanya pada dr Said Aandy Sp PD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Jiwa Aceh, apa penyakit yang diderita David Yuliansyah sehingga dia harus dirujuk dari IGD Rumah Sakit Jiwa Aceh ke RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh pada Sabtu, 10 Desember 2022 pagi sebelum David meninggal dunia.

130

“Pada waktu itu hendak dirujuk karena pertimbangan kondisi pasien yang tidak stabil dan membutuhkan penanganan lebih lanjut karena keterbatasan alat. Kalau terkait penyakit, sepertinya ada aspek etika kedokteran. Jadi, bisa ditanyakan manajemen rumah sakit karena keterangan rekam medis sudah dibuat,” kata dr Said Aandy Sp PD, Jumat, 8 Desember 2023.

Berbeda dengan Dr dr Taufik Suryadi SpK Dipl-BE dan dr Said Aandy Sp PD, dr Syahrial SpKJ, dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Aceh, tidak merespon pertanyaan-pertanyaan yang [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) ajukan. Ia juga tidak menjawab panggilan telepon [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Di dalam gelar perkara, Rabu, 22 Februari 2023, Roselita bertanya pada Aipda Irwandi SE, polisi yang bertugas di BNNP Aceh dan terlibat dalam penangkapan David. “Bang, baju almarhum suami saya di mana?”

“Sudah kami serahkan,” jawab Aipda Irwandi SE.

Roselita menegaskan hal itu tidak benar. Aipda Irwandi tak lagi menanggapi desakan Roselita mengenai pakaian David di malam penangkapan.

Irfan meminta rekaman CCTV yang menunjukkan adiknya, David Yuliansyah, membanting-bantingkan diri di dinding dan menjatuhkan diri di kamar mandi dihadirkan dalam gelar perkara selanjutnya agar dia bisa melihat hal itu dan menerima klaim itu.

“Kami mengetahui David dianiaya dari Rahmad Saidi alias Memet. Tolong hadirkan dia, Iqbal, dan Rahmat Riski. Pakaian David di malam penangkapan di mana? Hadirkan

131

pakaian David,” ujar Irfan lagi. “Hadirkan juga Zulmansyah alias Si Nek. Mengapa nama dia hilang? Apakah karena BNNP Aceh sudah ambil uang dia senilai Rp 15 juta?”

Irfan Nanda Setia melanjutkan, “Jika bapak-bapak punya itikad untuk mengungkap kasus ini, saya melaporkan kasus ini bukan saat adik saya sudah di dalam tanah, melainkan saat jenazahnya di rumah sakit. Tapi tak ada seorang pun penyidik yang datang ke rumah sakit.”

“Anehnya, ada dua penyidik, yang berpangkat Kopol dan Iptu, datang ke rumah di hari kedua adik saya meninggal dunia pagi-pagi saat kami sedang musibah dan meminta kami membuat surat penolakan autopsi,” ujar Irfan Nanda Setia lagi.

“Siapa yang suruh buat surat itu?” tanya Kabag Wassidik Ditreskrim Polda Aceh, AKBP Syukri SH.

Irfan mengacungkan jarinya ke wajah Kopol Raja Gunawan dan Iptu Iwan Setiawan.

Aiptu Indrawan Sastra, dari Bidkum Polda Aceh, menengahi. “Berarti dalam gelar perkara ini kita belum bisa mengambil kesimpulan. Tolong hadirkan permintaan keluarga dalam gelar perkara selanjutnya,” katanya.

Usai gelar perkara tersebut dilangsungkan, polisi tak mengizinkan Muhammad Qodrat Husni Putra, Roselita, dan Irfan Nanda Setia, membawa pulang salinan pemaparan penyidik yang sempat dibagikan pada saat berlangsungnya gelar perkara tersebut.

**ALIH-ALIH** memenuhi permintaan Irfan Nanda Setia, Roselita, dan Muhammad Qodrat dalam gelar perkara pada Rabu, 22 Februari 2023, penyidik Ditreskrim Polda Aceh justru menghentikan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan David Yuliansyah hingga dia meninggal dunia, Selasa, 7 Maret 2023.

Dirreskrim Polda Aceh, Kombes Ade Harianto, dalam siaran pers, Rabu, 8 Maret 2023, mengatakan bahwa dalam gelar perkara yang menghadirkan ahli pidana, ahli forensik, dokter spesialis penyakit dalam, dan pihak terkait lainnya, termasuk kuasa hukum dan keluarga korban, penyidik menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memiliki cukup unsur untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Setelah tahapan proses hukum dilaksanakan, termasuk gelar perkara dengan menghadirkan ahli, disimpulkan bahwa kasus tersebut tidak cukup unsur untuk dinaikkan ke penyidikan sehingga kasus itu dihentikan atau SP3,” kata Kombes Ade Harianto, Rabu, 8 Maret 2023.

Mantan Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Ir Sukandar MM, membantah bahwa anggotanya telah melakukan penganiayaan pada David Yuliansyah hingga dia meninggal dunia.

“Itu kan versi dari penasihat hukum keluarga korban. Versi sebenarnya, ketika korban ditangkap, penyidik BNNP belum sempat bertanya apa-apa padanya karena dia saat itu sedang sakit. Lalu kondisinya semakin menurun. Keterangan dari kawannya, David mengonsumsi sabu setiap hari. Lalu, kami merawat David di Rumah Sakit



Mantan Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Ir Sukandar MM.

Bhayangkara. Dari Rumah Sakit Bhayangkara kemudian dikembalikan ke BNNP. Lalu, dia sakit lagi,” katanya, Rabu, 15 Maret 2023, saat ditemui di sela-sela kegiatan silaturahmi dengan jajaran pejabat Setdakab Pidie, di Pendopo Bupati Pidie.

Brigjen Pol Ir Sukandar MM mengakui adanya lebam-lebam di tubuh David. Namun, menurutnya, lebam-lebam itu hanya lebam biasa. “Itu hanya lebam mayat saja,” kata Brigjen Pol Ir Sukandar MM.

Brigjen Pol Sukandar juga menampik bahwa David ditangkap tanpa surat perintah penangkapan. “Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba punya waktu enam hari. Dalam rentang waktu tersebut akan ditentukan statusnya: tersangka atau tidak,” ujarnya.

Sama seperti mantan Kabid Penindakan BNNP Aceh, Kombes Mirwazi, Brigjen Pol Ir Sukandar MM kini juga sudah pensiun.

Surat permohonan wawancara [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) pada Senin, 4 Desember 2023 belum direspon Polda Aceh. Selain itu, surat yang [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) tujukan ke BNNP Aceh pada hari yang sama—dengan nomor agenda 1355—juga belum direspon.

**ROSELITA** dan Irfan Nanda Setia mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Aceh (KIA) pada 16 Mei 2023. Keduanya memberikan kuasa pada advokat publik YLBHI-LBH Banda Aceh: Syahrul SH MH, Muhammad Qodrat Husni Putra SH MH, Siti Farahsyah Addurunnafis SH, dan Rahmad Maulidin SH.

Adapun informasi publik yang dimohonkan, antara lain salinan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPP/17.a/III/RES.1.6/2023/Subdit III-Resum tanggal 7 Maret 2023, salinan hasil visum et repertum terhadap jenazah David Yuliansyah, salinan hasil ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah David Yuliansyah, salinan berita acara pemeriksaan saksi-saksi yang telah diperiksa selama penyelidikan berlangsung, salinan seluruh rekaman CCTV yang diperoleh dan diperiksa penyidik selama proses penyelidikan berlangsung, salinan laporan hasil gelar perkara yang pernah dilakukan oleh penyidik selama proses

penyelidikan berlangsung, salinan power point yang pernah dipaparkan penyidik dalam gelar perkara tanggal 22 Februari 2023, dan salinan seluruh alat bukti lainnya yang diperoleh dan diperiksa penyidik selama proses penyelidikan berlangsung.

Sengketa informasi publik-- nomor register 001/V/KIA-PS-A/2023--yang diajukan Roselita dan Irfan Nanda Setia, dengan termohon Kepolisian Daerah Aceh, ini, ditolak untuk seluruhnya oleh ketua majelis yang menangani sengketa informasi publik ini, Arman Fauzi, dan anggota majelis Andi Rahmadsyah dan Nurlaily Idrus, dalam sidang pembacaan putusan, Selasa, 10 Oktober 2023.

Majelis komisioner KIA berpegang pada Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor: TAP/01/1/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Polda Aceh, di mana sembilan salinan dokumen yang dimohonkan masuk ke dalam dokumen-dokumen yang dikecualikan.

Majelis komisioner KIA juga menyebutkan meskipun penyelidikan perkara dugaan penganiayaan David hingga dia meninggal dunia telah dihentikan, bukan berarti informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan tersebut dapat dibuka dan diberikan pada pemohon. Hal itu, menurut majelis, didasari ketentuan Pasal 78 Ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait daluarsa suatu tindak pidana.

Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat Husni Putra, menilai salinan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPP/17.a/III/RES.1.6/2023/Subdit III-Resum tanggal 7 Maret 2023, salinan berita acara pemeriksaan saksi-saksi yang telah diperiksa selama penyelidikan berlangsung, salinan seluruh rekaman CCTV yang diperoleh dan diperiksa penyidik selama proses penyelidikan berlangsung, salinan laporan hasil gelar perkara yang pernah dilakukan oleh penyidik selama proses penyelidikan berlangsung, salinan power point yang pernah dipaparkan penyidik dalam gelar perkara tanggal 22 Februari 2023, dan salinan seluruh alat bukti lainnya yang diperoleh dan diperiksa penyidik selama proses penyelidikan berlangsung, bukanlah informasi-informasi yang dikecualikan karena penyelidikan kasus David Yuliansyah sudah dihentikan.

“Khusus untuk rekam medis, hasil visum dan autopsi, meski saat penyelidikan kasus ini masih berlangsung, seharusnya diterima dan diketahui keluarga korban sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 4 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” kata Muhammad Qodrat.

Muhammad Qodrat juga menjelaskan pertimbangan majelis komisioner KIA, yang menyatakan meskipun penyelidikan perkara dugaan penganiayaan David hingga dia meninggal dunia telah dihentikan bukan berarti informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan tersebut dapat dibuka dan diberikan pada pemohon karena ketentuan

Pasal 78 Ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait daluarsa suatu tindak pidana, adalah sesat pikir. “Logikanya kalau sudah daluarsa tentu tidak ada gunanya lagi dokumen-dokumen yang dimohonkan tersebut. Apakah maksud KIA pemohon harus menunggu daluarsa kasus ini terlebih dahulu?” sebut Muhammad Qodrat lagi.

Fungsi KIA, kata Muhammad Qodrat lagi, bukan melihat ada atau tidak adanya uji konsekuensi suatu badan publik, melainkan menilai apakah proses dan hasil uji konsekuensi tersebut sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan sehingga, misalnya, salinan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPP/17.a/III/RES.1.6/2023/Subdit III-Resum tanggal 7 Maret 2023, salinan laporan hasil gelar perkara yang pernah dilakukan oleh penyidik selama proses penyelidikan berlangsung, dan salinan power point yang pernah dipaparkan penyidik dalam gelar perkara tanggal 22 Februari 2023, tidak bisa diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan.

Ketua KIA yang juga ketua majelis yang menangani sengketa informasi publik dengan nomor register 001/V/KIA-PS-A/2023, Arman Fauzi, enggan berkomentar terkait putusan tersebut.

“KIA sudah menetapkan putusan atas sengketa tersebut. Bahkan pemohon sudah mengajukan banding ke PTUN Banda Aceh. Karena ini sudah diputuskan majelis, mungkin bisa dipelajari di putusan,” kata Arman Fauzi, Kamis, 7 Desember 2023.

**SELEPAS** David meninggal dunia, Iqbal dan Rahmat Riski dibebaskan. “Saya berada di sel BNN selama empat hari. Saya yang pulang paling terakhir. Rahmat Riski pulang sehari sebelumnya. Dia dijemput ayahnya,” kata Iqbal.

Baik Muhammad Riski maupun Iqbal masih bertanya-tanya mengapa saat penyidik melakukan rekonstruksi di rumah kontrakan Iqbal, mereka tidak menghadirkan keluarga David Yuliansyah.

Jumat, 10 November 2023, sinarpidie.co ingin menemui Rahmad Saidi alias Memet di rumahnya, di Dusun Cempaka, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

"Memet tidak ada di rumah. Kalau perlu dengan Memet, nanti saya sampaikan pada dia," kata ayah Rahmad Saidi alias Memet, Abdullah, 66 tahun. []

## Bagaimana Aktivitas Penambangan Minyak Ilegal di Ranto Peureulak Berjalan?



140

Sumur-sumur minyak ilegal di sejumlah gampong di Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, berada wilayah kerja sama operasi (KSO) PT Pertamina dan PT Aceh Timur Kawai Energy, sebuah BUMD Pemkab Aceh Timur. Letak mereka tepat di sebelah selatan Mapolres Aceh Timur. Minyak-minyak ini diduga digunakan untuk kebutuhan industri aspal dan industri tambang. Harganya lebih murah daripada harga minyak yang dijual Pertamina. Pikap-pikap dan truk-truk pengangkut minyak lalu-lalang di depan Mapolsek Ranto Peureulak di Gampong Pasir Putih setiap hari, kecuali Jumat.

141

**T**IGA tahun yang lalu, F, salah seorang keuchik di salah satu gampong di Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, mencoba peruntungan di usaha penambangan minyak ilegal. Ia, bersama empat rekannya, mengumpulkan uang patungan untuk mengebor beberapa sumur minyak di salah satu gampong di Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur.

Selama empat bulan F dan empat rekannya menggeluti usaha ini, tapi alih-alih mendapatkan keuntungan, modal

Di sepanjang jalan di Gampong Buket Pala, toko-toko yang menjual alat-alat pengeboran minyak dan drum-drum minyak berjajar.



142

mereka justru lenyap di bulan keempat. Tak ada minyak mentah yang ditemukan di sumur-sumur yang mereka bor.

“Total uang patungan kami yang telah habis adalah Rp 150 juta. Risiko yang paling besar diterima donatur yang menanggung uang makan jika minyak tidak ditemukan. Jika minyak ditemukan, mereka (donatur uang makan) akan mendapatkan bagian yang lebih besar,” kata F, Selasa, 19 Desember 2023.

Donatur adalah sebutan untuk mereka yang membiayai atau memodali pengeboran sumur minyak dan penambangan minyak ilegal di Ranto Peureulak, Aceh Timur.

Berbeda dengan donatur yang menanggung peralatan pengeboran, seperti pipa besi berukuran tiga inci, casing pipa besi, mesin pompa, mesin dongfeng, kepala katrol, kotrek, pipa paralon, dan tali tambang kapal, yang tidak sepenuhnya merugi seperti kerugian yang dialami donatur yang menanggung makanan dan minuman selama pengeboran berlangsung jika minyak tidak ditemukan, alat-alat pengeboran sumur minyak tersebut masih bisa digunakan untuk sumur-sumur minyak yang baru atau dijual kembali. Sementara, ditemukan atau tidaknya minyak di sumur yang dibor, donatur yang menanggung biaya makanan dan minuman untuk tukang bor mengeluarkan uang paling sedikit Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu per hari selama satu bulan.

“Waktu yang biasanya dibutuhkan untuk menemukan satu sumur minyak adalah satu bulan. Tukang bor terdiri dari

143



Aktivitas penambangan minyak di kebun sawit di Gampong Alue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur.

empat hingga enam orang. Uang makan mereka per orang setiap hari adalah Rp 100 ribu,” sebut F.

Donatur yang menanggung biaya peralatan pengeboran dan biaya konsumsi selama pengeboran berlangsung terdiri dari dua atau lebih donatur.

“Kalau pipa tertanam di dalam tanah, baru donatur yang menanggung alat merugi. Jika minyak berhasil ditemukan, persen atau pembagian keuntungan untuk donatur alat lebih kecil,” ujar F lagi.

Saat itu, F menjadi salah seorang donatur alat-alat pengeboran. “Saya hampir menjual ruko untuk melanjutkan usaha itu, tapi saat itu tak ada yang mau beli ruko saya. Jadi ruko saya selamat, dan sejak saat itu saya tidak terjun lagi ke bidang itu,” kata F.

Pengeboran sumur minyak ilegal di Gampong Pasir Putih, Gampong Mata Ie, Gampong Seunebok Dalam,

Gampong Bhom, Gampong Pulo Blang, Gampong Blang Barom, Gampong Pertamina, Gampong Alue Dua, Alue Geunteng, Gampong Beurandang, dan Gampong Alue Udeep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat rakitan yang terdiri dari pipa besi berukuran tiga inci, paralon, tali tambang, mata bor, dan mesin pompa, mesin dongfeng, kotrek, dan kepala katrol. Jumlah pipa besi yang digunakan di setiap sumur minyak sedikitnya 70 batang—panjang setiap pipa enam meter— hingga 90 batang.

Di setiap sumur yang mengandung minyak, mesin menarik kotrek berkapasitas enam ton untuk mengerek pipa pembawa minyak ke dalam drum. Warga setempat menyebut

Di Gampong Mata Ie, sumur-sumur minyak ilegal tersebar di lereng bukit, di tepi sungai, bahkan di dalam pekarangan rumah-rumah warga.



rangka alat penambangan minyak tersebut dengan sebutan *rek*.

Terpal biru atau terpal hitam yang berukuran lima meter menaungi sumur-sumur minyak ilegal di sana. Di dekat sumur-sumur minyak ilegal, terdapat bak penampungan lumpur atau limbah yang berukuran 1 x 1 meter. Warga setempat menyebutnya *complong*.

Donatur bekerja sama dengan warga Gampong Pasir Putih, Gampong Mata Ie, Gampong Seunebok Dalam, Gampong Bhom, Gampong Pulo Blang, Gampong Blang Barom, Gampong Pertamina, Gampong Alue Dua, Alue Geunteng, Beurandang, dan Gampong Alue Udeep,



146



Pengeboran minyak di sejumlah Gampong di Ranto Peureulak, Aceh Timur, dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat rakitan.

Kecamatan Ranto Peureulak, tempat sumur-sumur minyak ilegal bertebaran— saat ini sumur-sumur minyak ilegal paling banyak tersebar di Gampong Mata Ie.

Warga tempatan menyediakan lahan dan tenaga kerja. Setelah pengeboran sumur minyak selesai dan minyak berhasil ditemukan, jumlah pekerja di satu sumur minyak ilegal menjadi dua hingga sembilan pekerja. Mereka adalah penarik minyak. Warga setempat menyebut mereka sebagai tukang *pacok*.

“Hanya ada satu atau dua buruh *pacok* di satu sumur minyak jika dalam sehari jumlah minyak yang mereka tambang di bawah sepuluh drum (drum 220 liter), tapi jika dalam satu hari jumlah minyak mentah yang ditambang mencapai 40 drum hingga 100 drum, jumlah buruh *pacok* di

147



Salah satu sumur minyak di Dusun Bakti, Gampong Pasir Putih. Sumur baru ini berada di jalur yang sama dengan telaga peninggalan Belanda.

satu sumur minyak mencapai sembilan orang. Dalam satu kali 24 jam, mereka (tukang pacok) bekerja dalam tiga *shift*. Libur hanya di hari Jumat. Mereka dibayar per drum, yaitu Rp 100 ribu dan Rp 150 ribu per drum,” sebut sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co), Selasa, 19 Desember 2023.

Sementara, pengebor sumur minyak, meski tak lagi bekerja di penambangan minyak di sumur yang telah dibor sebelumnya, tetap mendapatkan satu bagian.

Yang dimaksud satu bagian untuk tukang bor sumur minyak ilegal dan dua bagian untuk pemilik lahan tempat sumur minyak ilegal beroperasi adalah satu banding sepuluh dan dua banding sepuluh. Dalam kata lain, sebagai contoh, dari sepuluh drum minyak yang ditambang per hari, tukang

bor mendapatkan satu drum minyak dan pemilik lahan mendapatkan dua drum minyak.

“Para donatur memperoleh tiga bagian,” ujar sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co). “Sisanya digunakan untuk operasional selama proses penambangan minyak dan pemuatan minyak. Donatur makanan tidak lagi mengeluarkan uang saat minyak sudah ditambang.”

Gampong-gampong tempat sumur-sumur minyak ilegal berada di Kecamatan Ranto Peureulak juga mengutip pungutan: Rp 5 ribu per drum. “Setoran untuk polisi adalah Rp 10 ribu per drum,” ungkap sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) itu menyebutkan pembagian satu banding sepuluh, dua banding sepuluh, dan tiga banding sepuluh baru berlaku jika modal para donatur sudah balik.

“Sebelumnya, pemilik lahan mendapatkan satu bagian tapi sekarang menjadi dua bagian dengan alasan besarnya risiko yang akan mereka terima jika sumur minyak di lahan mereka terbakar dan meledak,” kata sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) lagi.

Satu drum 220 liter minyak mentah dijual Rp 700 ribu hingga Rp 900 ribu. “Sekarang sudah turun harganya. Sebelumnya harga satu drum minyak mentah mencapai Rp 1,2 juta,” sebut sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Lewat agen atau pengepul, minyak-minyak mentah dari Rantau Peureulak diangkut dengan pikap dan truk ke Stabat, Langkat, Tanjung Pura, dan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, untuk disuling atau dimasak menjadi minyak tanah, bensin, dan solar. Selain itu, perusahaan-perusahaan Asphalt

Mixing Plant (AMP) atau industri aspal hotmix di Aceh Timur juga memasok minyak mentah Ranto Peureulak untuk kegiatan industri mereka.

Saat ini, minyak-minyak mentah juga disuling atau dimasak di gampong-gampong tempat penambangan minyak ilegal beroperasi—kecuali Gampong Pasir Putih—menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. “Harga mereka lebih murah daripada minyak yang dijual Pertamina, dan kualitas mereka lebih rendah daripada minyak Pertamina,” sebut sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Per drum 220 liter, minyak tanah Ranto Peureulak dijual Rp 1,4 juta. Sementara, solar dan bensin per drum 220 liter dijual berkisar antara Rp 1,3 juta hingga Rp 1.350.000. “Minyak tanah, solar, dan bensin Ranto Peureulak paling banyak dijual ke kawasan industri di Kota Lhokseumawe dan Meulaboh, Aceh Barat,” kata sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

### **Sumur-sumur minyak ilegal di jalur telaga (bekas sumur minyak) Belanda**

Sumur-sumur minyak ilegal bertebaran di dekat telaga—sebutan untuk bekas sumur minyak perusahaan Belanda Holland Perlak Petroleum Maatschappij—di Gampong Pasir Putih.

Setelah Indonesia merdeka, sejak 1961 hingga tahun 1970-an, sumur-sumur minyak peninggalan Belanda itu sempat ditambang PT Asemara Oil dan dilanjutkan PT

150



M Amin Ag, 80 tahun, menunjukkan salah satu telaga peninggalan Belanda di Dusun Bakti, Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur.

Pertamina yang bekerja sama dengan Pacific Oil & Gas Limited (POG): Blok Peureulak.

Pada tahun 80-an, M Amin Ag, 80 tahun, Teungku Imum Gampong Pasir Putih, pernah bekerja di PT Asemara Oil, sebuah perusahaan minyak dan gas asal Kanada.

“Di Ranto Panyang, PT Asemara mengebor minyak dengan kedalaman 2.000 meter, dan di Julok Rayeuk perusahaan itu mengebor gas dengan kedalaman 4.000 hingga 4.500 meter,” kata M Amin, Selasa, 19 Desember 2023.

Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia membuat PT Asemara tidak memperpanjang kontrak.

151

Gampong Pasir Putih memiliki tiga dusun, yaitu Dusun Kama Dingin, Dusun Bakti, dan Dusun Bukit Peusangan. Telaga-telaga Belanda menyebar di tiga dusun di gampong itu. “Tapi telaga peninggalan Belanda yang paling banyak ada di Dusun Bakti,” ujar M Amin.

M Amin membawa [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) melihat telaga atau sumur minyak peninggalan Belanda—well head sumur-sumur itu telah ditutup—di Dusun Bakti, Gampong Pasir Putih.

Dalam radius 50 hingga 150 meter dari sejumlah telaga (sumur minyak peninggalan Belanda) di sana, sumur-sumur minyak baru terhampar di sebuah kebun sawit. Sumur-sumur minyak baru ini berada di jalur yang sama dengan telaga peninggalan Belanda.

Satu drum 220 liter minyak mentah dijual Rp 700 ribu hingga Rp 900 ribu.



152



153

“Telaga-telaga Belanda terlalu dalam (2000 meter) sehingga warga tidak menambang minyak di telaga-telaga itu, tapi mengebor sumur-sumur minyak baru di dekat mereka. Mesin tidak tahan jika harus mengaktifkan telaga Belanda. Penambang yang ada sekarang hanya menambang minyak rata-rata dengan kedalaman 80 batang pipa (480 meter),” kata Amin lagi.

Pengeboran dan penambangan minyak secara ilegal mulai dilakukan oleh masyarakat di sejumlah gampong di Kecamatan Ranto Peureulak sejak 2011 silam, dan sejak 2013 pengeboran di sumur-sumur minyak baru di sana semakin masif.

Di tahun yang sama, pada 2013, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur meminta PT Pertamina agar Blok Peureulak bisa dikelola pemerintah kabupaten setempat lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): PT Aceh Timur Kawai Energy.

Pertamina menyetujui hal itu pada 2014. Tiga tahun kemudian, pada November 2017, Blok Peureulak diresmikan. Selain kerjasama antara Pertamina dan Pemkab Aceh Timur, investor dari China dan Australia, dengan jumlah investasi mencapai US\$ 87,842,307 atau Rp 1,1 triliun lebih, juga ikut dalam KSO dengan luas area WK offshore seluas 76,93 kilometer persegi itu.

Ironisnya, Blok Peureulak—wilayah KSO PT Pertamina dan PT Aceh Timur Kawai Energy—justru menjadi tempat di mana ratusan sumur minyak ilegal bertebaran.

154



Aktivitas penambangan minyak ilegal di sejumlah gampong di Kecamatan Ranto Peureulak berada wilayah KSO PT Pertamina dan PT Aceh Timur Kawai Energy, sebuah BUMD Pemkab Aceh Timur.

## Para peleles dan ledakan sumur minyak

Pada 2015 hingga 2018, Gampong Pasir Putih adalah gampong yang paling banyak memiliki sumur minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak. Sumur-sumur minyak di sana kerap disambangi para *peleles*, sebutan untuk warga yang meminta minyak pada penarik minyak atau tukang *pacok*. Para peleles ini menjinjing beberapa jerigen lima liter.

“Mereka membawa handuk kecil lalu mencelupkan handuk ke dalam drum minyak. Kemudian handuk itu diperas ke dalam jerigen dan timba yang mereka bawa,” ujar

155



Warga sedang mengangkut rangka alat pengeboran minyak atau rek yang baru selesai dirakit.

sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co). “Hal itu mereka lakukan pada setiap sumur minyak yang sudah menambang minyak mentah.”

Para *peleles* ini juga sering meminta tukang *pacok* di sumur minyak ilegal menuangkan minyak mentah sebanyak satu kaleng oli bekas ke dalam jerigen lima liter yang mereka bawa.

“Harga minyak mentah per jerigen lima liter adalah Rp 2.800. Pendapatan para *peleles*, dalam satu hari, berkisar Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu,” ujar sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Rabu, 25 April 2018 dini hari, sepuluh sumur minyak ilegal di Dusun Bakti, Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, terbakar dan meledak.

Mula-mula, satu dari sepuluh sumur minyak itu menyemburkan minyak yang melimpah sehingga tumpah ke

tanah. Puluhan warga datang untuk melihat semburan minyak tersebut. “Dan ada yang datang untuk mengambil minyak yang sudah tumpah ruah di tanah,” sebut sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Tiba-tiba api berkobar dari sumur itu dan dalam hitungan detik menyambar sembilan sumur minyak lainnya. Api menjulang hingga melewati pohon kelapa. Kebakaran itu menelan 28 korban jiwa. 30 lainnya mengalami luka bakar yang serius dan lima rumah hangus terbakar. Kata sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co), korban yang meninggal dunia rata-rata adalah para *peleles*.

Sawah seluas tujuh hektare di Gampong Pasir Putih tercemar limbah pertambangan sumur minyak ilegal—lumpur berkadar minyak dan lumpur berkadar belerang—akibat kebakaran dan ledakan 10 sumur minyak ilegal tersebut. Karena itu, selama empat tahun warga di Gampong Pasir Putih tidak bisa menggarap sawah mereka. “Baru pada 2023 sawah-sawah itu bisa kembali ditanami padi. Lima rumah yang terbakar sudah dibangun kembali dengan APBK Pemkab Aceh Timur,” kata sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

### **30 ton minyak mentah di staging/yard PT Pertamina KSO Aceh Timur Kawai Energy**

Dalam kebakaran 10 sumur minyak ilegal di Gampong Pasir Putih yang menewaskan 28 orang, polisi menetapkan enam tersangka. Salah satu dari enam tersangka dalam kasus

## MINYAK RANTO PEUREULAK

HARGA MINYAK MENTAH RANTO PEUREULAK PER DRUM 220 LITER: RP 700 RIBU HINGGA RP 900 RIBU.

MINYAK MENTAH RANTAU PEUREULAK DIJUAL KE LANGKAT, TANJUNG PURA, DAN PANGKALAN ORANDAN, SUMATERA UTARA, UNTUK DISULING ATAU DIMASAK MENJADI MINYAK TANAH, BENSIN, DAN SOLAR.

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) ATAU INDUSTRI ASPAL HOTMIX DI ACEH TIMUR JUGA MEMASOK MINYAK MENTAH RANTO PEUREULAK UNTUK KEGIATAN INDUSTRI MEREKA.

MINYAK MENTAH JUGA DISULING ATAU DIMASAK DI GAMPONG-GAMPONG TEMPAT PENAMBANGAN MINYAK ILEGAL BEROPERASI—KECUALI GAMPONG PASIR PUTIH—MENJADI MINYAK TANAH, SOLAR, DAN BENSIN.

PER DRUM 220 LITER, MINYAK TANAH RANTO PEUREULAK DIJUAL RP 1,4 JUTA. SEMENTARA, SOLAR DAN BENSIN PER DRUM 220 LITER DIJUAL BERKISAR ANTARA RP 1,3 JUTA HINGGA RP 1.350.000.

MINYAK TANAH, SOLAR, DAN BENSIN RANTO PEUREULAK PALING BANYAK DIJUAL KE KAWASAH INDUSTRI DI KOTA LHOEKSEUMAWE DAN MEULABOH, ACEH BARAT.



sinarpidie.co



Aktivitas penambangan minyak di lereng-lereng bukit di Gampong Mata le.

tersebut adalah Burhanuddin, mantan Keuchik Gampong Pasir Putih. Burhan menerbitkan SK Keuchik Gampong Pasir Putih tentang Penetapan Badan Amil Gampong Pasir Putih. Lewat SK ini, Gampong Pasir Putih melakukan pengutan Rp 5 ribu per drum minyak di setiap sumur minyak ilegal yang beroperasi di gampong tersebut. “Untuk gampong sebenarnya hanya Rp 2 ribu. Rp 3 ribu lainnya untuk pihak-pihak lain,” kata sumber sinarpidie.co, tanpa menyebutkan pihak lain yang dia maksud.

Keenam tersangka ini dijerat Pasal 52 juncto Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas juncto Pasal 359 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Idi memvonis mereka dengan hukuman lima bulan penjara pada September 2018.

30 ton minyak mentah yang ditampung dalam dua tanki di staging/ yard PT Pertamina KSO PT Aceh Timur Kawai Energy di Gampong Pertamina, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, ikut menjadi barang bukti dalam perkara ini. Tapi kasus tersebut hanya berhenti pada donatur, buruh *pacok*, keuchik, ketua pemuda, pemilik lahan, dan penjual alat-alat pengeboran minyak ilegal.

“Sejak kebakaran di Gampong Pasir Putih, aktivitas penambangan minyak yang masif bergeser ke Gampong Seunebok Dalam,” kata sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co). “Kemudian berpindah lagi ke Mata Ie. Pola itu berulang-ulang setiap adanya kasus kebakaran sumur minyak. Di Gampong Pasir

Saat ini, minyak-minyak mentah juga disuling atau dimasak di gampong-gampong tempat penambangan minyak ilegal beroperasi di Kecamatan Ranto Peureulak—kecuali Gampong Pasir Putih—menjadi minyak tanah, solar, dan bensin.



160



Peleles adalah sebutan untuk warga yang meminta minyak pada penarik minyak atau tukang *pacok*.

Putih, saat ini, hanya ada puluhan sumur minyak dan tidak ada lagi sumur minyak di dalam pekarangan rumah pascakebakaran 2018.”

Kebakaran sumur minyak ilegal pun terus berulang. Jumat, 11 Maret 2022 malam, tiga orang meninggal dunia akibat kebakaran sumur minyak di Gampong Mata Ie. Baru-baru ini, Rabu, 27 Desember 2023 sore, dapur atau tempat penyulingan minyak di Gampong Alue Dua juga terbakar.

Ratusan sumur minyak ilegal di Gampong Mata Ie, toko-toko yang menjual alat-alat pengeboran minyak, dan bengkel-bengkel yang merakit *rek*.

Selasa, 19 Desember 2023 siang, [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) berkunjung ke Gampong Mata Ie. Deru mesin menggantung

161

di udara. Di gampong ini, sumur-sumur minyak ilegal tersebar di lereng bukit, di tepi sungai, bahkan di dalam pekarangan rumah-rumah warga. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka berada di jalur yang sama dengan telaga peninggalan Belanda.

Jarak antara satu sumur minyak ilegal dan sumur minyak ilegal lainnya adalah 30 meter. Para pengepul, dengan drum-drum minyak yang tersusun di tepi jalan, begitu sibuk melayani para *peleles* yang sedang menjual minyak yang mereka telah kumpulkan. Bau minyak tanah begitu kentara di setiap sudut di sana. Limbah-limbah penambangan minyak mengalir ke sungai. Puluhan *peleles* hilir mudik dari satu sumur minyak ke sumur minyak lainnya.

Peleles di Gampong Mata Ie.



162



Bengkel perakitan rek atau rangka alat penambangan minyak.

"Di Gampong Mata Ie, puluhan *peleles* berasal dari Peudawa, Idi, dan Sungai Raya. Mereka tiba di Mata Ie di pagi hari dengan pikap dan becak. Pagi diantar dan selepas magrib dijemput," sebut sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Hari itu, mobil pikap dan truk pengangkut drum-drum minyak juga lalu-lalang di jalan tanpa henti hingga menjelang Magrib.

Sebelum tiba di Gampong Mata Ie, di sepanjang jalan di Gampong Buket Pala, toko-toko yang menjual alat-alat pengeboran minyak dan drum-drum minyak berjajar. Bengkel-bengkel yang merakit alat-alat pengeboran juga bisa ditemukan di sepanjang jalan di gampong itu.

Distributor alat-alat pertambangan minyak tradisional di toko-toko di Gampong Buket Pala ini terletak di depan

163



Rek atau rangka alat penambangan minyak di Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, direndam banjir, Rabu, 20 Desember 2023.

### Mapolsek Ranto Peureulak di Gampong Pasir Putih: Gudang Besi CH.

Keuchik Gampong Mata Ie, Muhammad, menolak diwawancarai. “Dan tak ada satu pun warga Mata Ie yang akan bersedia diwawancarai,” katanya melalui panggilan telepon WhatsApp, Selasa, 19 Desember 2023.

Sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co) menyebutkan saat ini terdapat 215 hingga 220 sumur minyak ilegal yang telah berproduksi di Gampong Mata Ie. “Saat ini, Gampong Mata Ie adalah pusat penambangan minyak terbesar di Ranto Peureulak,” ujar sumber [sinarpidie.co](http://sinarpidie.co).

Gampong Mata Ie, yang memiliki luas 8,00 kilometer persegi, berbatasan dengan Polres Aceh Timur yang

beralamat di Gampong Paya Bili I, Kecamatan Peudawa, Aceh Timur. Gampong ini terletak di sebelah selatan kantor polisi tersebut.

Keesokan harinya, Rabu, 20 Desember 2023, tak ada aktivitas penambangan minyak di Gampong Mata Ie karena sumur-sumur minyak di sana direndam banjir. []

## LBH Banda Aceh

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh didirikan pada bulan September 1995 dengan nama *LBH Project Base Aceh* berdasarkan mandat Dewan Pengurus YLBHI. Pembentukan LBH Banda Aceh ini adalah untuk menjawab kondisi politik di Aceh saat itu. Terutama sejak diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) oleh Pemerintah Pusat pada tahun 1989. Kasus-kasus penangkapan, penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat yang dituduh terlibat dan mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh aparat keamanan terjadi hampir saban hari. Proses hukum merupakan barang langka, jika tidak ingin dikatakan tidak ada sama sekali.

Di tengah kondisi demikian, YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH di luar Aceh. Pengiriman pengacara ini tentu sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan advokasi yang lebih strategis serta jangka

panjang. Inilah yang menjadi basis analisis YLBHI membentuk Project Base Aceh dalam melakukan program-programnya di Aceh dengan isu khusus, yaitu hak sipil dan politik.

Motif pembentukan tersebut telah membawa LBH Banda Aceh sejak tahun-tahun awal pendiriannya, terlibat dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu sipil dan politik di Aceh. “Ketika orang menelepon dan mengatakan seseorang telah ditangkap atau ‘menghilang’. Saya harus bergerak cepat, karena menunda mungkin berarti siksaan atau kematian,” ungkap Syarifah Murlina, salah satu Pengabdian Bantuan Hukum LBH Banda Aceh ketika diwawancarai sebuah media massa saat itu.

Pada tahun 1999 LBH Banda Aceh mendapat SK sebagai lembaga baku di bawah payung YLBHI, bukan lagi berstatus *project base*. Hingga kini LBH Banda Aceh telah dipimpin oleh sejumlah pimpinan; 8 orang direktur dan 1 orang *care taker*.

# **sinarpidie.co**

**sinarpidie.co** adalah media siber yang mencoba menyajikan berita secara mendalam dan terverifikasi dengan menerapkan standar disiplin verifikasi dan menguji setiap informasi. Karena itu, kami tak perlu tergesa-gesa dalam memberitakan sebuah peristiwa yang tak pernah tunggal.

Jurnalisme yang diusung sinarpidie.co adalah jurnalisme yang memihak pada kepentingan publik dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan publik agar mereka dapat memutuskan bagaimana seharusnya sesuatu hal yang menyangkut kepentingan mereka diatur dan dijalankan.

Media yang berkantor di Kota Sigli, Kabupaten Pidie, ini, meskipun berada di pinggiran, mencoba menjadikan HAM, pluralisme, kesetaraan gender, lingkungan hidup, penegakan hukum, dan demokrasi sebagai isu utama yang kami sebarakan. []



Akhir-akhir ini, setidaknya di Aceh, kejelasan terhadap informasi adalah barang langka. Setiap hari kita memang membaca berita dan laporan, yang sering kali sumber utamanya dapat diprediksi, yakni humas institusi resmi, tapi hanya berupa penjelasan sepihak. Jarang ada upaya untuk meragukan pernyataan institusi resmi, seolah-olah apa yang diberitakan memang sudah seharusnya seperti itu.

Apabila berita-berita tersebut kita susun secara ensiklopedik dan kronologis, setidaknya dalam jangka waktu sepuluh tahun ke belakang, untuk membantu kita mendapatkan gambaran tertentu tentang Aceh, kenyataan kita, maka kenyataan itu disusun berdasarkan sudut pandang birokrat, anggota dewan, polisi, tentara, agamawan, dan asosiasi kontraktor.

